

**EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU PRAKERJA  
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT PENERIMA  
DI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO  
DITINJAU DENGAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**



Oleh:

Anik Nur Ria

NIM 401190023

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

**IAIN  
PONOROGO**

## ABSTRAK

Ria, Anik Nur. Efektivitas Program Kartu Prakerja dalam Meningkatkan Kesejahteraan Penerima di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*. 2023. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Candra Febrilyantri, M.Ak.

**Kata kunci:** Efektivitas, Program Prakerja, Kesejahteraan

Efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu tujuan ditinjau dari kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah dicapai dalam manajemen, serta tujuan apa yang telah dicapai untuk menciptakan kreativitas. Keberadaan program kartu prakerja bagi para pencari kerja, orang yang kehilangan pekerjaan, serta bagi orang yang ingin meningkatkan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sangatlah penting guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi program kartu prakerja di Kecamatan Sampung, untuk menganalisis strategi program kartu prakerja dalam proses seleksi di Kecamatan Sampung, untuk menganalisis efektivitas program kartu prakerja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sampung.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik dalam analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan penulis menyimpulkan: 1) Implementasi program kartu prakerja di Kecamatan Sampung sangat tinggi antusiasnya, baik pemerintah daerah maupun warganya. 2) Strategi yang dilakukan yaitu dengan menghadirkan tim IT di tiap desa serta menyebarluaskan informasi ini di media social. 3) Kesejahteraan masyarakat sendiri belum sepenuhnya terpenuhi, akan tetapi dari insentif yang didapatkan untuk tambahan modal usaha untuk kebutuhan sehari-hari.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anik Nur Ria

NIM : 401190023

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PENERIMA DI KECAMATAN  
SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO DITINJAU DENGAN PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya seni saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 06 Juni 2023  
Pembuat pernyataan,



50AKX223392276 Anik Nur Ria  
NIM 401190023

**IAIN**  
**PONOROGO**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

### LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi atas nama saudara:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL SKRIPSI
1	Anik Nur Ria	401190023	Ekonomi Syariah	Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian Munaqosah.

Ponorogo, 02 Mei 2023

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Menyetujui,  
Pembimbing

**Candra Febrilvantri, M.Ak.**  
NIP 199202042020122023

P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Penerima Di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Ditinjau Dengan Perspektif Ekonomi Islam

Nama : Anik Nur Ria  
NIM : 401190023  
Jurusan : Ekonomi Syariah

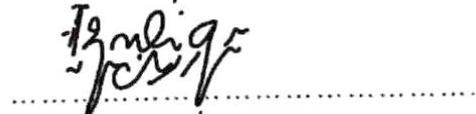
Telah diujikan dalam viding *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

#### DEWAN PENGUJI:

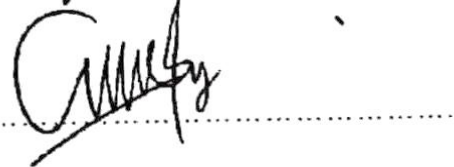
Ketua Sidang  
Dr. Amin Wahyudi, M.E.I.  
NIP 197502072009011007

: 

Penguji I  
Ruliq Suryaningsih, M.Pd  
NIDN 202006801

: 

Penguji II  
Candra Febrilyantri, M.Ak  
NIP 199202042020122023

: 

Ponorogo, 06 Juni 2023  
Mengesahkan,  
Dekan FEB IAIN Ponorogo

  
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.  
NIP. 197207142000031005

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anik Nur Ria

NIM : 401190023

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

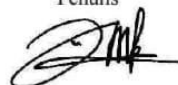
Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Penerima di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Ditinjau Dengan Perspektif Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. adapun ini dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 06 Juni 2023  
Penulis



Anik Nur Ria  
NIM 401190023

 Dipindai dengan CamScanner

PONOROGO

## TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan Ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf latin dan sebagainya. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	^	د	d	ض	d}	م	M
ب	b	ذ	dh	ط	t}	ن	N
ت	t	ر	r	ظ	z}	و	W
ث	th	ز	z	ف	F	ه	H
ج	j	س	s	ق	Q	لا	lam alif
ح	h}	ش	sh	ك	K	ي	Y
خ	kh	ص	s}	ل	L		

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal diatas huruf a>,i>, dan u>.
3. Bunyi huruf dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”.

Contoh: *bayna, 'layhim, qawl, maqd}u>'ah*

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh: **PONOROGO**

Ibn Taymi>yah bukan ibnu Taymi>yah. *Inna al-di>n 'inda Alla>h al-  
isla>m* bukan *Inna al-di>na 'inda Alla>h al-  
isla>mu. ... Fahuwa wa>jib*  
bukan *fahuwa wa>jibu* dan bukan *fahuwa wa>jibun*.

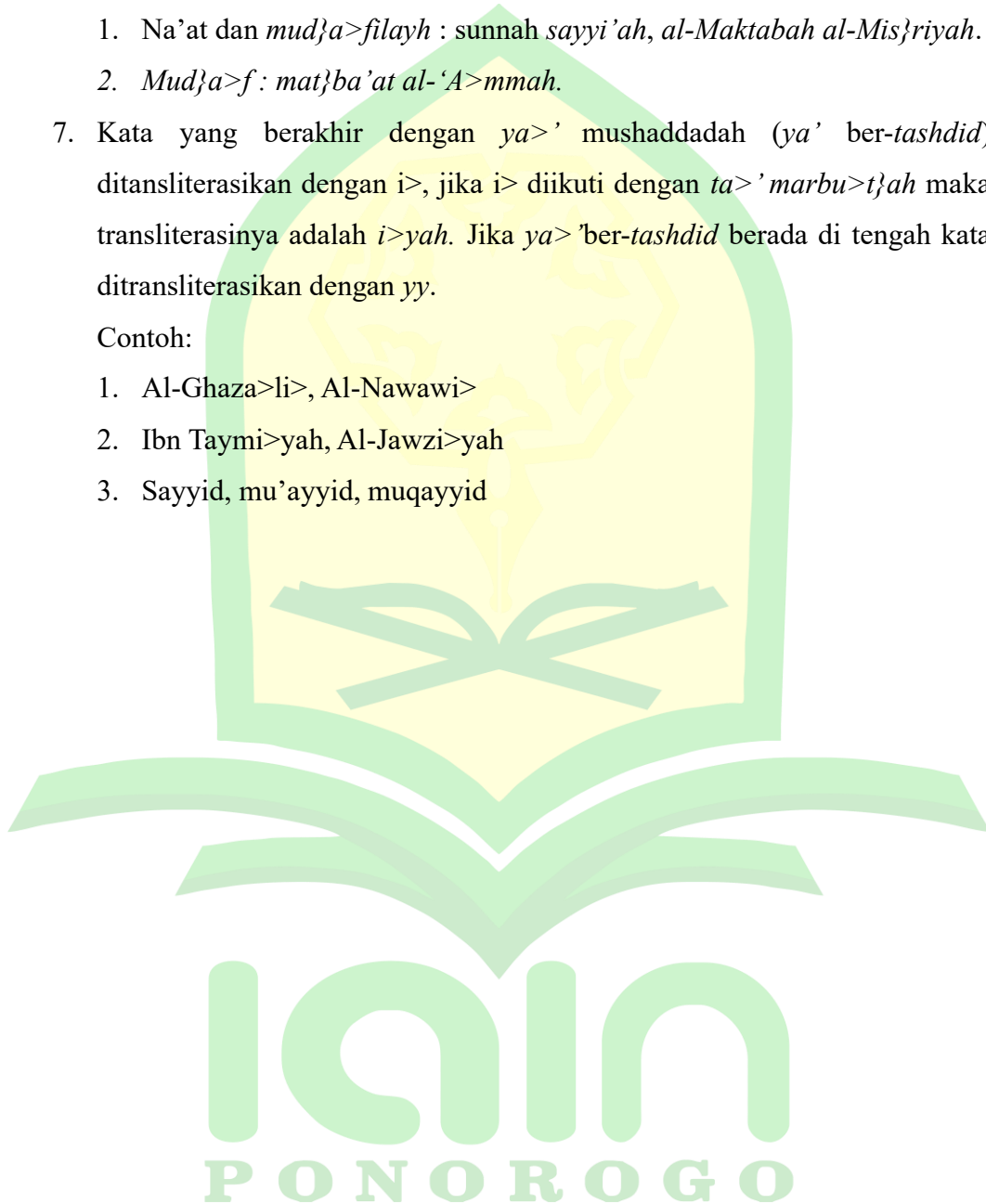
6. Kata yang berakhir dengan *ta>'marbu>t}ah* dan berkedudukan sebagai sifat (na'at) dan *id}a>fah* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan *mud}a>f* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

1. Na'at dan *mud}a>filayh* : *sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Mis}riyah*.
  2. *Mud}a>f* : *mat}ba'at al-'A>mmah*.
7. Kata yang berakhir dengan *ya>'* mushaddadah (*ya'* ber-*tashdid*) ditransliterasikan dengan *i>*, jika *i>* diikuti dengan *ta>'marbu>t}ah* maka transliterasinya adalah *i>yah*. Jika *ya>'* ber-*tashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

1. Al-Ghaza>li>, Al-Nawawi>
2. Ibn Taymi>yah, Al-Jawzi>yah
3. Sayyid, mu'ayyid, muqayyid





## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: ”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 5:2.

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Studi Penelitian Terdahulu .....	14
F. Metode Penelitian .....	29
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
2. Kehadiran Peneliti .....	29
3. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	30
4. Data dan Sumber Data.....	31
5. Teknik Pengumpulan Data .....	32
6. Teknik Pengolahan Data .....	33
7. Teknik Analisis Data.....	34
8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	36
G. Sitematika Pembahasan .....	39
<b>BAB II EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU PRAKERJA.....</b>	<b>41</b>
A. Prakerja.....	41
1. Pengertian Kartu Prakerja .....	41
2. Tujuan Kartu Prakerja.....	42
3. Implementasi Dalam Mengikuti Kartu Prakerja.....	44

3. Analisis Implementasi William Dun .....	45
B. Efektivitas.....	47
1. Pengertian Efektivitas .....	47
2. Konsep Efektivitas .....	48
C. Kesejahteraan.....	53
1. Pengertian Kesejahteraan .....	53
2. Konsep Kesejahteraan .....	54
3. Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	61
4. Kesejahteraan Menurut al-Qur'an.....	62
5. Kesejahteraan pada Masa Rasulullah SAW .....	63
<b>BAB III PAPAN DATA EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU</b>	
<b>PRAKERJA .....</b>	<b>67</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	67
1. Gambaran Umum Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo .....	67
B. Temuan Hasil Penelitian.....	70
1. Implementasi Program Kartu Prakerja di Kecamatan Sampung.....	70
2. Strategi Program Kartu Prakerja Dalam Proses Seleksi Di Kecamatan Sampung.....	75
3. Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Sampung. ....	79
<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>83</b>
A. Implementasi Program Kartu Prakerja di Kecamatan Sampung .....	83
B. Strategi Program Kartu Prakerja Dalam Proses Seleksi Di Kecamatan Sampung.....	87
C. Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Sampung dalam Perspektif Islam .....	89
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>101</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan pada ekonomi dengan skala makro adalah adanya pengangguran. Tingkat pengangguran yang semakin tinggi bisa menjadi indikator adanya tekanan psikologi yang tinggi dan penurunan pada standar hidup.<sup>2</sup> Topik tersebut menjadi penting karena sring digunakan dalam debat antar politisi terkait dengan segala kebijakan yang mempunyai hubungan dengan membuat atau menambah lapangan kerja yang ada. Menurut pendapat dari Sukirno, pengangguran didefinisikan pada mereka yang pada usia aktif kerja tetapi sedang atau tidak bekerja karena pertimbangan jenis pekerjaan yang sesuai dan jumlah gaji yang diinginkan.<sup>3</sup> Sejalan dengan pendapat di atas, bahwa dalam arti pengangguran merupakan masyarakat dengan usia kerja dan pada proses mencari kerja. Pengangguran terjadi karena adanya berbagai faktor diantaranya adalah sempitnya lapangan pekerjaan, kemudian banyaknya persyaratan yang tidak mampu dipenuhi oleh para pelamar pekerja, kemudian adanya pergeseran teknologi membuat pekerja tidak di imbangi dengan keahlian yang ada sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja, serta banyak faktor lain seperti kemunduran perekonomian, naik turunnya kegiatan ekonomi karena

---

<sup>2</sup> Moh Faizin, *Ekonomi Makro Islam*, ed. MOH NASARUDIN, EDISI 1 (Pekalongan, Jawa Tengah: PT NASYA EXPANDING MANAGEMENT, 2021), 143.

<sup>3</sup> Teddy Christianto Leasiwal, *Teori–Teori Pertumbuhan Ekonomi Dan Hubungannya dengan Variabel Makro Ekonomi* (Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media, 2022), 57.

berbagai faktor dan kebutuhan dunia kerja yang tidak sesuai keahlian para pencari kerja.

Selain itu penyebab pengangguran dalam dua tahun terakhir yang dilansir dari halaman resmi Badan Pusat Statistik pada Agustus 2022 terdapat 4.150.000 atau sebesar 1,98 persen Indonesia pada usia produktif terkena positif virus covid-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 berjumlah 24.000 (dua puluh empat ribu) penduduk, Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 32.000 (tiga puluh dua ribu) penduduk, sementara yang tidak bekerja dan terkena Covid 19 sebanyak (sebelas ribu) sedangkan pada masyarakat yang dan menjadi menganggur karena COVID-19 348.000 (tiga ribu empat ratus delapan ribu) penduduk.<sup>4</sup>

Pandemi Covid-19 juga sangat berdampak pada sektor ekonomi yang tidak proporsional dan terdapat kelompok penduduk khusus, yang dapat memberikan efek negatif dan menimbulkan ketimpangan bagi beberapa kelompok pekerja, terutama pekerja yang memiliki masalah kesehatan dan juga bagi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diakibatkan langsung oleh pandemi ini, tentunya pemutusan hubungan kerja tersebut juga menambah jumlah pengangguran, sehingga angka kemiskinan juga akan meningkat. Adanya pandemi ini juga berdampak pada kelompok rentan lainnya seperti perempuan dan kelompok

---

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, “Agustus 2022: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 5,86 Persen Dan Rata-Rata Upah Buruh Sebesar 3,07 Juta Rupiah per Bulan,” 2022, [https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/11/07/1916/agustus-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-86-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-07-juta-rupiah-per-bulan.html#:~:text=Tingkat Pengangguran Terbuka \(TPT\) Agustus,kerja yang terdampar. Diakses pada 28 November 2022 pukul 21.27 WIB](https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/11/07/1916/agustus-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-86-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-07-juta-rupiah-per-bulan.html#:~:text=Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus,kerja yang terdampar. Diakses pada 28 November 2022 pukul 21.27 WIB)

pekerja mingguan, seperti mereka yang biasanya bekerja tetapi sekarang tidak bekerja dan hanya tinggal di rumah.<sup>5</sup>

Pandemi mendorong pemerintah melakukan kebijakan terkait dengan situasi yang ada dengan adanya UU Cipta Kerja 2022 Nomor 11. Adanya UU Cipta kerja dimaksudkan pemerintah menanggapi fluktuasi ekonomi akibat adanya pandemic covid 19 dengan cara mempermudah adanya proses melakukan investasi dalam negeri. Adanya kemudahan dalam investasi dimaksudkan dalam mendorong terciptanya lapangan kerja secara luas. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat. Adanya Undang-Undang terkait cipta lapangan kerja, terdapat gagasan dari perintah berupa penyederhanaan dan penyelarasan regulasi dan perizinan, serta pencapaian investasi yang berkualitas. Selain itu, ditegaskan lagi dalam Peraturan Presiden perubahan kedua No. 36 tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kinerja Melalui Program Kartu Prakerja. Program ini dikhususkan kepada pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena PHK dan pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan guna untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu. Sertifikat pelatihan merupakan bukti tertulis yang

---

<sup>5</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Kajian Dampak COVID-19 Terhadap Pasar Tenaga Kerja Dan Respons Kebijakan Di Kawasan Asia Dan Pasifik,” 2021, dalam <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/08/18/2433-kajian-dampak-covid-19-terhadap-pasar-tenaga-kerja-dan-respons-kebijakan-di-kawasan-asia-dan-pasifik>. (diakses pada tanggal 26 Mei 2023, jam 20.10 WIB).

diberikan oleh lembaga pelatihan kepada peserta pelatihan setelah pelatihan selesai dikerjakan.

Program kartu prakerja merupakan program kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta yang bertujuan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkompetitif. Pendaftaran program kartu prakerja tidak sembarangan, adapun kriteria tertentu diantaranya: berusia 18-64 tahun, bukan pelajar maupun mahasiswa, dan bukan pejabat negara, ASN, TNI, Polri, Pimpinan dan anggota DPRD, Kepala Desa dan perangkat desa, hingga Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas BUMN dan BUMD. Selain itu, program kartu prakerja melakukan pendaftaran secara *online* sampai proses pencairan insentif dengan mengakses web resmi di [prakerja.go.id](http://prakerja.go.id).<sup>6</sup>

Insentif merupakan tambahan manfaat bagi penerima kartu prakerja dalam bentuk uang dengan nominal tertentu Bagi masyarakat yang sudah mendaftar kemudian lolos tahap selanjutnya yaitu mengikuti pelatihan kartu prakerja *online* dan mendapatkan pendanaan dari pemerintah sebesar Rp 3.550.000 dengan rincian Rp 1.500.000 untuk 3 kali pelatihan, Rp 2.400.000 insentif bantuan manfaat yang dibagikan dalam kurun waktu 4 bulan, dan Rp 150.000 untuk insentif pengisian survey dibagi sebanyak 3 kali. Ada 8 mitra platform digital yang bekerja sama dengan pemerintah dalam memberikan pelatihan-pelatihan kepada peserta lolos program kartu

---

<sup>6</sup> Peraturan Presiden, "Perpres No 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja," Perpres Nomor 113 Tahun 2022.pdf, Diakses pada hari Senin 30 Januari 2023 pukul 20.41 WIB.

prakerja, yaitu tokopedia, *skill academy*, ruang guru, mau belajar apa, bukalapak, pintaria, sekolahmu, pijar mahir dan kemnaker.go.id.<sup>7</sup>

Dalam rangka penyelenggaraan program kartu prakerja dibentuk komite cipta kerja yang memiliki tugas guna merumuskan dan menyusun kebijakan program kartu prakerja dan melakukan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan program kartu prakerja. Selain itu, komite cipta kerja juga dibantu oleh tim pelaksana dan manajemen pelaksana yang bertugas sebagai pengelola sumber daya manusia, keuangan teknologi, data, dan infrastruktur, serta penyalarsan program pelatihan di kementerian atau lembaga, pelaksanaan kemitraan dengan pelaku usaha, pelaksanaan kerja sama dengan platform digital, penyedia informasi pasar kerja, pelaksanaan pengembangan produk pelatihan, dan pengembangan proses bisnis dan sistem operasi.<sup>8</sup>

Peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam hal ini sebagai kepala daerah yang bertujuan untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom serta melakukan sosialisasi pelaksanaan program kartu prakerja, penyedia data lembaga pelatihan yang berkualitas dimasing-masing daerah, penyedia data kebutuhan tenaga kerja oleh industri di daerah, fasilitas pendaftaran peserta dan pemilihan jenis pelatihan pada program kartu prakerja. Selain itu bentuk dukungan Pemerintah Daerah yaitu sistem berbagi biaya pendanaan program

---

<sup>7</sup> Ibid., 5.

<sup>8</sup> Ibid., 10.



kartu prakerja dan pendampingan kepada penerima manfaat program kartu prakerja dan usaha kecil menengah.<sup>9</sup> Sebab adanya program prakerja ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi Indonesia yang sempat merosot karena adanya pandemi yakni dengan melakukan pembukaan kartu prakerja dengan luas, lebar dan merata, sehingga pendaftar bisa dilakukan oleh siapapun dari latar belakang dan tujuan yang berbagai macam dengan pilihan mengikuti satu pelatihan yang diberikan oleh program prakerja. Sehingga diharapkan akan terjadi perbaikan dari usaha kecil menengah atau UMKM.<sup>10</sup>

Program kartu prakerja juga memiliki ketentuan-ketentuan untuk pelaksanaannya meliputi penyesuaian kebijakan atau tindakan mengenai pendaftaran, kepesertaan, pelatihan, kemitraan, biaya pelatihan dan insentif dan kebijakan atau tindakan terkait lainnya. Ketentuan tersebut diantaranya apabila penerima kartu prakerja tidak mengembalikan bantuan biaya pelatihan atau insentif dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari maka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka wajib mengembalikan bantuan biaya pelatihan atau insentif tersebut apabila tidak maka manajemen pelaksana dapat melakukan pembekuan akun penerima kartu prakerja, penagihan pengembalian bantuan biaya pelatihan atau insentif penerima kartu prakerja, serta tindakan lain terkait tata kelola program kartu prakerja. serta apabila ada yang sengaja melakukan

---

<sup>9</sup> Ibid., 14.

<sup>10</sup> Adetya Firnanda, Clarisa Fitri, Fahmi Ardianto “Evaluasi Program Kartu Prakerja Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan Dan Aksesibilitas,” *Hukum Magnum Opus* Volume 4 Nomer 2 (2021): 172.

pemalsuan identitas data pribadi maka manajemen pelaksana akan melakukan gugatan ganti rugi yang dapat diajukan melalui lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pendaftaran kartu prakerja sendiri hanya dapat dilakukan satu kali.<sup>11</sup>

Semenjak diluncurkannya program kartu prakerja mulai Maret 2020 sampai 2022 yang mana awalnya merupakan semi bansos yang sudah dibuka sampai empat puluh tujuh gelombang dan sudah banyak pendaftar manfaat program prakerja yang telah memperoleh manfaat bantuan yang diberikan karena telah mengikuti program prakerja.<sup>12</sup> Sehingga program tersebut layak dan harus dilakukan peninjauan atau evaluasi terkait dengan efektivitas program yang telah dilakukan bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini akan mengkaji terkait efektivitas Program Kartu Prakerja dari sudut asas ketepatan program dalam memanfaatkan dana bantuan modal ini bagi masyarakat Indonesia. Dalam penelitian ini menawarkan kebaruan yaitu tinjauan dari sudut asas ketepatan program dalam memanfaatkan dana bantuan modal yang telah diberikan melalui program kartu prakerja yang dijalankan saat ini oleh pemerintah.

---

<sup>11</sup> Peraturan Presiden, “Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja,” 2022, 2, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/225309/perpres-no-113-tahun-2022>. (diakses pada tanggal 26 Mei 2023, jam 21.51)

<sup>12</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Gelombang Kartu Prakerja Dibuka,” 2022, dalam <https://www.kominfo.go.id/content/detail/40049/gelombang-23-kartu-prakerja-dibuka-dengan-jumlah-kuota-500000/0/berita>. (diakses pada tanggal 20 Februari 2023, jam 22.03)

Berdasarkan data yang diperoleh dari tim fasilitator prakerja, bahwa di tingkat Jawa Timur Kabupaten Ponorogo diposisi ke 14 (empat belas) serta penerima manfaat program kartu prakerja di Kabupaten Ponorogo mulai Maret 2020 sampai tahun 2022 yang dimulai dari gelombang 1 sampai dengan gelombang 47 secara keseluruhan berjumlah 44.000 (empat puluh empat ribu) penerima manfaat kartu prakerja yang berasal dari 21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo, berikut data jumlah penerima manfaat kartu prakerja di Kabupaten Ponorogo<sup>13</sup>:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Peserta Lolos Prakerja	Jumlah Pemilik UMKM
1	Kecamatan Sampung	749	105
2	Kecamatan Slahung	602	46
3	Kecamatan Sukorejo	490	47
4	Kecamatan Bungkal	470	13
5	Kecamatan Jambon	433	50
6	Kecamatan Sambit	402	39
7	Kecamatan Balong	351	134
8	Kecamatan Jenangan	313	32
9	Kecamatan Kauman	237	60
10	Kecamatan Siman	207	48
11	Kecamatan Badegan	203	56
12	Kecamatan Pulung	197	64
13	Kecamatan Sawo	179	67
14	Kecamatan Ngrayun	126	16
15	Kecamatan Mlarak	120	46

<sup>13</sup> Nanda Dwi Yanuari, *Wawancara*, 30 Januari 2023

16	Kecamatan Jetis	113	34
17	Kecamatan Babadan	100	64
18	Kecamatan Ngebel	89	55
19	Kecamatan Pudak	86	25
20	Kecamatan Ponorogo	78	47
21	Kecamatan Sooko	75	77
	<b>Jumlah</b>	<b>5620</b>	<b>1125</b>

**Table 1.1** Total Penerima manfaat program kartu prakerja

Sumber: Wawancara Koordinator Program Kartu Prakerja Kabupaten Ponorogo pada tanggal 30 Januari 2023

Pada tabel diatas terlihat bahwa tingkat kelolosan prakerja terbesar di Kecamatan Sampung, akan tetapi di Kecamatan tersebut dalam menghasilkan peserta untuk melakukan usaha masih sedikit, adapun kendala yang dialami peserta yaitu ketidaktahuan program tersebut dan peserta tertarik mengikuti program karena mendapatkan *insentif*, sebab pada saat ini yang dibutuhkan berupa bantuan uang tunai. Keikutsertaan mendaftar prakerja ini ada orang yang membantu mendaftarkan (tim fasilitator prakerja) karena kebanyakan peserta tidak mengerti bagaimana cara pendaftarannya dan tidak pandai menggunakan teknologi, memang dalam proses program kartu prakerja ini bersifat online mulai dari pendaftaran, pelatihan serta pencairan *insentif*. Namun, setelah mengikuti pelatihan banyak peserta yang tidak mengembangkan ilmu yang didapatkan, ilmu yang didapatkan hanya digunakan untuk dirinya sendiri dan uang *insentif* yang didapatkan digunakan untuk keperluan sehari-harinya. Karena, keberhasilan suatu program tergantung kepada penerimanya bagaimana memanfaatkan pelatihan yang telah diberikan. Tujuan diadakan pelatihan

agar peserta mampu meningkatkan kemampuan dari segi *skill*, etos kerja, maupun semangat berwirausaha guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas usaha.

Dan dijelaskan dalam Al-Quran surat al-furqan ayat 67 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

*Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelajaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”<sup>14</sup>*

Mengacu pada ayat diatas dijelaskan terkait dengan urgensi efektivitas dalam ranah islam, dengan adanya sebuah keefektivan kaum muslim dapat mengatur pengeluaran dengan memperhitungkan secara cermat supaya apa yang telah dikeluarkan atau di belanjakan tepat sesuai dengan kebutuhan dan kegunaan yang dibutuhkan, seperti membelajarkan sesuatu kepada orang yang tidak benar-benar membutuhkan dan memberikan harta melebihi yang dimilikinya hal ini bisa menjadi kendala dalam meraih hidup yang baik.

Ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam telah disebutkan bahwasanya Ekonomi Islam mengarahkan pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, kepada seluruh ciptaanNya. Kesejahteraan merupakan cita-cita manusia, bangsa, dan Negara. Allah SWT menganjurkan umatnya untuk

---

<sup>14</sup> Azhari Tarigan Akmal, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Quran* (Bandung: Citapusataka Media Perintis, 2012), 214.

bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga dapat mencapai kesejahteraan.

Dari pernyataan diatas, maka saya tertarik mengadakan penelitian pada program kartu prakerja. Untuk itu penulis mengangkat judul **“EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PENERIMA DI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO DITINJAU DENGAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program kartu prakerja di Kecamatan Sampung?
2. Bagaimana strategi program kartu prakerja dalam proses seleksi di Kecamatan Sampung?
3. Bagaimana tingkat efektivitas program kartu prakerja dalam meningkatkan kesejahteraan di Kecamatan Sampung ditinjau dengan perspektif ekonomi islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi program kartu prakerja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana strategi program kartu prakerja dalam proses seleksi di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas program kartu prakerja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo ditinjau dengan perspektif ekonomi islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat di masa sekarang dan masa yang akan datang. Adapun manfaat yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian yang dilakukan bermaksud memberikan manfaat terkait dengan upaya memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait dengan penggunaan manfaat dari insentif yang diperoleh dari dana prakerja yang telah di ikuti, selain itu terkait dengan pengetahuan yang telah didapatkan selama pelatihan pada pengimplementasian di kehidupan sehari-hari kedepannya dalam tinjauan syariat islam. Selain

itu hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangsih pada bidang kajian perekonomian modern dan para pelakunya khususnya mahasiswa islam dalam ekonomi islam.

2. Secara praktis, manfaat penelitian ini bertujuan:

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mencetak mahasiswa dan alumni yang mampu menyusun karya ilmiah yang baik. Menjadikan IAIN Ponorogo sebagai salah satu kampus yang mampu dinilai bagus dalam hal mencetak mahasiswa yang baik.

b. Bagi Penyelenggara Program Kartu Prakerja

Dapat memberikan informasi terkait bagaimana keefektifan program kartu prakerja dalam hal pemanfaatan modal insentif yang telah diberikan dan pelatihan yang sudah dilakukan. Sebagai masukan dalam penanganan efektivitas program agar dimanfaatkan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan penyelenggara program kartu prakerja.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan mampu menjadi sebuah bahan rujukan dan memberikan wawasan pengetahuan yang berhubungan dengan permodalan baik itu terkait dengan program kartu prakerja maupun berhubungan dengan program lainnya dan sebagai masyarakat yang hendak menggunakan program kartu prakerja diharapkan untuk lebih bijak dalam menyikapi sistem



pendanaan maupun pelatihan yang telah disediakan oleh program kartu prakerja agar dimanfaatkan dengan baik.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini adalah bentuk dari pemenuhan syarat untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dapat menambah pengalaman dalam melakukan penelitian serta memberikan wawasan mengenai efektivitas program kartu prakerja dalam hal pemanfaatan insentif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **E. Studi Penelitian Terdahulu**

Penulis telah berupaya melakukan penelusuran berbagai sumber dan studi telaah, bahwa pembahasan mengenai efektivitas program kartu prakerja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah banyak dibahas dalam karya ilmiah sebelumnya dengan teori umum maupun ditinjau dengan ekonomi syariah. Adapun karya ilmiah yang ada hubungannya dengan tema karya ilmiah yang diajukan penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Nadya Oktaviana, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. “Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kualitas SDM Prespektif Maqashid Syariah (Studi Bentiring Permai Kota

Bengkulu)”.<sup>15</sup> Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil yang dilakukan menunjukkan bahwa ditinjau dari *maqasid syariah* dalam teori Abu Hamid al-Ghazali, *hifdz al-aql* (memelihara akal), yaitu hal *al-talim* (hak untuk mendapatkan pendidikan) yakni dimama memang dalam program prakerja pengakuan penerima untuk meningkatkan keahlian dengan mengikuti pendidikan yang diberikan secara gratis. Sedangkan berdasarkan *hifdz al-mal* (memelihara harta), yaitu *haq al-amal* (hak bekerja). Hasil dari program prakerja ini adalah baik input ataupun outpu adalah terkait dengan peningkatan kompeten para penerima manfaatnya sehingga mampu berdaya saing dalam dunia pekerjaan khususnya pada Kelurahan Bentriring Permai karena beberapa sumber informasi mengungkapkan adanya ketidak sesuai pelatihan yang didapatkan dengan pengimplementasian di pekerjaan yang sedang dijalani, sehingga faktor pendorong utama dalam melakukan pelatihan di prakerja adalah demi memperoleh insentif. Sedangkan segi efektivitas program pada aspek kepuasan dan sarana memang sudah sesuai karena berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa program prakerja telah diterima sesuai dengan yang membutuhkan dan mengaku puas terhadap program yang ada. Perbedaan penelitian Oktaviana dan penulis yaitu pada perbedaan teori, milik Oktaviana menjelaskan peningkatkan SDM yang ditinjau dalam

---

<sup>15</sup> Nadya Oktaviana, “Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kualitas SDM Prespektif Maqashid Syariah (Studi Bentiring Permai Kota Bengkulu)” (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

prespektif *maqasid syariah* dengan aspek *hifdzul aql* (memelihara akal) dan *hifdzul mal* (memelihara harta) sedangkan milik penulis menggunakan teori kesejahteraan dalam prespektif ekonomi islam. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas efektivitas dalam program kartu prakerja.

2. Skripsi Salsabilla Alia Rizki, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. "Implementasi Perpres No. 76 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi di Akun Tiktok @panduanprakerja)"<sup>16</sup>. Metode penelitian Rizki menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini adalah program kartu prakerja berjalan sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan terbukti dengan banyaknya peminat program ini yang menurut data BPS 2020 sudah 5.560 yang telah melakukan pendaftaran. Prakerja memberikan suntikan hal yang positif dalam mendorong peningkatan keterampilan, sebanyak 22,4% masih menempati status sebagai pengangguran sehingga masih perlunya evaluasi pada program yang telah dilakukan karena kebanyakan pendaftaran hanya mengisi waktu luang selagi menunggu pekerjaan yang lain dengan adanya pandemic covid 19. Perbedaan penelitian

---

<sup>16</sup> Salsabilla Alia Rizki, "Implementasi Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Di Akun Tiktok @Panduanprakerja)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

Rizki dan penulis yaitu, dalam penelitian Rizki menjelaskan program kartu prakerja dalam pandangan masalah mursalah menurut Al-Ghazali, bahwa masalah yaitu sesuatu ketetapan hukum yang tidak ada *nash* yang menolak atau menyetujuinya. Dengan panutan Perpres No. 76 tahun 2020 melihat implementasi yang terdapat pada Perpres tersebut, sedangkan penulis menjelaskan tentang teori kesejahteraan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu objek kajian dalam penelitian mengenai kebijakan Pemerintah berupa bantuan untuk masyarakat melalui program kartu prakerja.

3. Skripsi Anelia Meilani L.G, Program Kekhususan Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021 "Program Kartu Prakerja Dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat *Coronavirus Disease* 2019 (Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)".<sup>17</sup> Metode penelitian Meilani menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada hukum Peraturan Perundang-undangan. Hasil penelitian Meilani menyatakan bahwa program kartu prakerja telah sesuai dengan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Serta dalam program kartu

---

<sup>17</sup> Anelia Meilani L.G, "Program Kartu Prakerja Dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat *Coronavirus Disease* 2019 (Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021).

prakerja memberikan peluang *Skilling*, *Upskilling*, dan *Reskilling* dengan menambah keterampilan untuk menjadi *entrepreneur*. Perbedaan penelitian Meilani dan penulis yaitu, pada penelitian Meilani membahas pemutusan hubungan kerja akibat covid-19 dalam pemenuhan hak tenaga kerja yang ditinjau dari perspektif hak asasi manusia yang termuat pada UU Tahun 1999 no. 39 merupakan sebuah perangkat akan hak yang telah melekat keberadaannya pada manusia yang merupakan makhluk tuhan dan merupakan sebuah anugerah yang harus dihormati, kemudian dijunjung dengan tinggi serta dilindungi oleh hukum dan negara serta pemerintahan dan juga oleh setiap orang demi harkat dan martabat sebagai manusia, sedangkan milik penulis menjelaskan tentang teori efektivitas program kartu prakerja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persamaan penelitian ini yaitu membahas subyek yang sama yaitu program kartu prakerja.

4. Skripsi Miftah Hakim Fadhollah, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021. "Analisis Potensi Maladministrasi Dalam Kebijakan Program Kartu Prakerja". Metode penelitian yang dilakukan oleh Fadhollah yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Fadhollah menyatakan bahwa adanya tindakan sewenang-wenang terhadap platform digital dalam mendukung proses program kartu prakerja dan diharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan proses legalitas agar tidak terjadi kesalahan administratif yuridis. Perbedaan penelitian Fadhollah dan

penulis yaitu, pada penelitian Fadhollah mengkaji terkait dengan istilah maladministrasi yang terjadi pada pelaksanaan program manfaat kartu prakerja supaya tidak adanya peristiwa atau perbuatan terkait dengan adanya praktek atau upaya penyalahgunaan dana yang melampaui wewenang dan hukum dan menggunakan wewenang yang ada untuk kepentingan dan tujuan yang lain, termasuk yang berhubungan dengan adanya kerugian yang dialami masyarakat baik itu materil dan immaterial akibat adanya sebuah pengabaian dan kelalaian dari penyelenggara pelayanan publik membahas tentang tinjauan perihal maladministrasi, yang terdapat dalam, selain itu penelitian yang dilakukan juga mengkaji terkait dengan asas umum dan kebijakan yang baik dalam pemerintahan (AUPB) dalam pelaksanaan program kartu prakerja, sedangkan milik penulis menjelaskan tentang teori efektivitas program kartu prakerja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persamaan penelitian ini membahas program kartu prakerja.<sup>18</sup>

5. Skripsi Dinda Siti Rachma, Program Studi Siyasah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, 2020. "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan (Evaluasi Perpres No. 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui

---

<sup>18</sup> Miftah Hakim Fadhollah, "*Analisis Potensi Maladministrasi Dalam Kebijakan Program Kartu Prakerja*" (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021).

Program Kartu Prakerja)". Metode penelitian yang digunakan oleh Rachma yaitu penelitian gabungan normatif (hukum doctrinal) dan empiris (lapangan). Hasil penelitian Rachma menyatakan bahwa program prakerja ini cukup efektif, serta untuk sosialisasi yang dilaksanakan oleh dinas tenaga kerja cukup efektif dan efisien di era revolusi 4.0 dan untuk pendaftaran yang akan datang lebih dipersiapkan lagi dalam mensosialisasikan program baik berkas pendaftaran maupun alat elektronik yang digunakan. Perbedaan penelitian Rachma dan penulis yaitu terkait mekanisme dan pelaksanaan peraturan presiden No. 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, sedangkan penulis membahas teori kesejahteraan masyarakat. Persamaan penelitian ini yaitu pada teori efektivitas pelaksanaan Program kartu prakerja.<sup>19</sup>

6. Skripsi Husni Nuryani HS dengan judul "Sistem Pendukung Keputusan Pada Penentuan Penerimaan Kartu Prakerja Menggunakan Metode *Simple Additive Weighting*". Metode penelitian yang digunakan saat pengumpulan data yaitu dengan observasi dan studi pustaka. Hasil dari penelitian Nuryani yaitu melakukan pembentukan system pada penerimaan prakerja dengan menggunakan *Simple Additive Weighting*

---

<sup>19</sup> Dinda Siti Rachmah, "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan (Evaluasi Perpres No. 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

(SAW) yang mana sistem ini mampu melakukan percepatan pada proses menentukan calon penerima peserta kartu prakerja dengan akurat dalam melakukan pemberian rekomendasi penerima kartu prakerja. Perbedaan penelitian Nuryani dan penulis yaitu pada penelitian Nuryani membahas tentang analisis kebutuhan, dan desain akan kebutuhan dalam melakukan keputusan penentuan penerima prakerja dengan Metode SAW *Simple Additive Weighting* (SAW) tak jarang dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot, sedangkan milik penulis membahas tentang teori efektivitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persamaan penelitian ini pada objek kajian yaitu mengenai kebijakan pemerintah berupa bantuan untuk masyarakat melalui program kartu prakerja.<sup>20</sup>

7. Jurnal Adryan Prasetyo, Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya. 2022. “Pengaruh Kartu Prakerja dan Penetrasi Internet Terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif eksplanatori. Hasil penelitian Adryan menjelaskan bahwa kartu prakerja mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja secara *negatif* dan penetrasi internet tidak mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja. Namun kartu prakerja dan penetrasi internet secara bersama-sama mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja di

---

<sup>20</sup> Husni Nuryani HS, “*Sistem Pendukung Keputusan Pada Penentuan Penerimaan Kartu Prakerja Menggunakan Metode Simple Additive Weighting*” (Universitas Bina Sarana Informatika, 2020).



Indonesia tahun 2020. Perbedaan penelitian Adryan dengan penulis adalah pada penelitian adryan menjelaskan terkait risiko penggunaan internet dalam penyerapan tenaga kerja sedangkan milik penulis menjelaskan tentang bagaimana kesejahteraan setelah mengikuti program kartu prakerja. Persamaan penelitian ini yaitu menggunakan subyek yang sama yaitu program pemerintah melalui kartu prakerja dalam penyerapan tenaga kerja Indonesia.<sup>21</sup>

8. Jurnal Muhammad Sabiq Balya, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021. “Penerapan Program Kartu Prakerja dalam Perspektif *Al-Mashlahah*”. Metode penelitian hukum empiris melalui pendekatan yuridis. Hasil penelitian Balya menjelaskan bahwa Program Kartu Prakerja berdasarkan ketentuan dalam Perpres No.76 Tahun 2020 di Kota Malang berlangsung dengan baik dengan adanya beberapa kendala dan adanya beberapa persoalan yang tertinggal sehingga adanya kebutuhan dalam melakukan sosialisasi program prakerja khususnya pada peserta terkait dengan peserta harus dalam melakukan kegiatan pelatihan dengan baik dan yang berhak menerima manfaat adalah benar-benar mereka yang membutuhkan. Adapun tinjauan *mashlahah*, yang dalam skripsi ini berfokus pada *mashlahah mursalah*, kebijakan Pemerintah RI melalui Program Kartu Prakerja merupakan suatu bentuk ijtihad

---

<sup>21</sup> Adryan Prasetyo, “Pengaruh Kartu Prakerja Dan Penetrasi Internet Terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia,” *Independen : Jurnal Of Economics* 2 nomor 1 (2022): 148–58.

yang dinilai sangat vital dalam upaya pengembangan ekonomi islam yang berorientasi kepada pemerintah dalam mensejahterakan umat. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian balya menjelaskan teori tentang *masalah mursalah* sedangkan milik penulis menjelaskan terkait bagaimana kesejahteraan masyarakat setelah mengikuti program kartu prakerja. Persamaan penelitian ini yaitu pada subjeknya terkait program pemerintah melalui kartu prakerja.<sup>22</sup>

9. Jurnal Imam Royani Hamzah, STAI As-Syiddiqiyah, 2021. “Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Maqashid Syariah”. Metode penelitian induktif dan deduktif. Hasil penelitian Imam menjelaskan bahwa kebijakan program kartu prakerja pada masa pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan konsep maqashid syariah. Hal tersebut didasarkan pada data realisasi program kartu prakerja yang hampir mencapai target. Meskipun realisasi tersebut banyak menimbulkan diskursus, akan tetapi kebijakan program kartu prakerja telah jatuh pada kesimpulan bahwa dana 20 Triliun sudah terserap 19,8 Triliun. Hal ini terlepas dari siapa saja yang menerima dana tersebut, baik itu masyarakat menengah kebawah atau keatas. Keduanya sama-sama menjadi korban dan dampak dari pandemi Covid-19, dan termasuk dalam ruang lingkup maqashid syariah yaitu asas dharuriyah (kebutuhan primer), hajiyah (sekunder) dan tahsiniyat (tersier).

---

<sup>22</sup> Muhammad Sabiq Balya, “Penerapan Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif AlMashlahah,” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* Volume 3 N (2021).

Perbedaan dengan penulis yaitu pada penelitian Imam menggunakan perspektif maqashid syariah sedangkan milik penulis yaitu bagaimana keefektifan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Persamaanya yaitu menggunakan subjek yang sama yaitu terkait program pemerintah melalui kartu prakerja.<sup>23</sup>

10. Jurnal Rani Ika Wijayanti, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020. “Optimalisasi Program Kartu Prakerja Dengan Pelatihan *Branding Strategy*”. Metode penelitian sekunder. Hasil penelitian Rani menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat setelah mengikuti program kartu prakerja masih bingung, untuk itu perlu pengoptimalisasian program kartu prakerja dengan memberikan pelatihan *branding strategy* bebas biaya agar para pemegang kartu prakerja, baik yang belum lolos mendapatkan kartu prakerja, dan masyarakat pada umumnya dapat melangkah dengan baik dalam memasarkan produknya yang berupa barang ataupun jasa. Perbedaan penelitian ini yaitu dalam penelitian Rani menjelaskan terkait *branding strategy* guna mengembangkan keterampilan masyarakat yang telah didapatkan dari program kartu prakerja sedangkan milik penulis menjelaskan bagaimana kesejahteraan masyarakat setelah mengikuti program kartu prakerja. Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada subjeknya yaitu program kartu prakerja.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Imam Royani Hamzah, “Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syariah” Vol 2 no 1 (2021): 19–25.

<sup>24</sup> Rani Ika Wijayanti, “Optimalisasi Program Kartu Prakerja Dengan Pelatihan Branding Strategy,” *Jurnal Dimasejati* vol 2 no 1 (2020): 109–22.

11. Jurnal Wiwik Onya Hutabarat, Universitas Riau, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, 2022. “Efektivitas Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program kartu pra kerja di Kota Pekanbaru belum efektif baik dari indikator ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Faktor yang menjadi pengambat dalam pelaksanaan program ini ialah program merupakan program dari pemerintah pusat dan kurangnya kesadaran masyarakat. Metode penelitian yang digunakan Wiwik adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini yaitu lokasi penelitian, pendekatan metode yang digunakan milik penulis menggunakan pendekatan fenomenology, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Persamaan penelitian ini yaitu menganalisis terkait efektivitas program kartu prakerja.<sup>25</sup>
12. Jurnal Deksa Imam Suhada, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2022. “Efektivitas Para Pelaku Ekonomi dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. Hasil penelitian Deksa adalah Untuk mewujudkan peningkatan dalam hal pertumbuhan ekonomi di perlukan kemajuan dan kestabilan dari berbagai sektor dan aspek kehidupan, salah satu aspek yang dapat mendorong terjadinya

---

<sup>25</sup> Wiwik Onya Hutabarat, “Efektivitas Program Kartu Prakerja Di Kota Pekanbaru,” *Jurnal Ilmiah Administrasi* Vol 5 No 2 (2022): 1271–78.

peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah para pelaku ekonomi. Metode penelitian yang digunakan Deksa yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta teknik yang digunakan milik Miles dan Huberman meliputi pengumpulan data, reduksi data, model data, penarikan kesimpulan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu terdapat dalam tingkatan efektivitas dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Perbedaan dengan penulis yaitu metode penelitian penulis menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenology serta subyek penulis yaitu menganalisis terkait program pemerintah berupa kartu prakerja guna meningkatkan kesejahteraan.<sup>26</sup>

13. Jurnal Maria Lusyana Br Ginting, Balitbang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, 2020. "Peran Pemerintah pada Kebijakan Kartu Prakerja dalam Memulihkan Kesejahteraan Prakerja di Masa Pandemi Covid-19". Hasil penelitian menjelaskan bahwa kartu prakerja mampu membantu pekerja dalam mengatasi perekonomian, namun belum maksimal dalam memulihkan kesejahteraan pekerja seperti sebelum adanya pandemi Covid-19. Maka dari pada itu pemerintah pusat dan daerah harus saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam memantau, membandingkan, hingga mengevaluasi kebijakan Kartu Prakerja, dan peran pemerintah daerah harus lebih dimaksimalkan dalam proses implementasi Kartu Prakerja.

---

<sup>26</sup> Deksa Imam Suhada, "Efektivitas Para Pelaku Ekonomi Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol 2 No 10 (2022): 3201.

Penelitian Maria menggunakan metode kajian literatur yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemikiran mengenai bagaimana peran pemerintah pada kebijakan kartu prakerja dalam memulihkan kesejahteraan pekerja di tengah pandemic Covid-19. Perbedaan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan milik penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenology, lokasi penelitian, analisis teori yang digunakan penulis yaitu terkait efektivitas program kartu prakerja. Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada subyek yaitu program pemerintah melalui kartu prakerja.<sup>27</sup>

14. Jurnal Siti Dwi Yana, IAIN Langsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021. "Efektivitas Program Kartu Prakerja dalam Membangun Sumberdaya Manusia di Tengah Pandemi". Hasil penelitian Siti yaitu bahwa program kartu prakerja kurang efektif dalam membangun sumberdaya manusia dan program kartu prakerja sangat berperan dalam membangun kualitas sumberdaya manusia. Metode penelitian yang digunakan Siti adalah kualitatif deskriptif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara terhadap masyarakat penerima bantuan program kartu prakerja. Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada pendekatan yang digunakan dimana penulis menggunakan pendekatan fenomenology,

---

<sup>27</sup> Maria Lusyana Br Ginting, "Peran Pemerintah Pada Kebijakan Kartu Prakerja Dalam Memulihkan Kesejahteraan Pekerja Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Analisis Kebijakan* Vol 4 No 2 (2020): 1.

lokasi penelitian. Persamaan penelitian ini terletak pada subyek yang digunakan yaitu program kartu prakerja dan analisis teori yang digunakan yaitu terkait keefektifan program kartu prakerja.<sup>28</sup>

15. Skripsi Audi Fadillah, Universitas Islam Negeri Dyarif Hidayatullah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Studi Ilmu Politik, 2022. “Implementasi Kebijakan Kartu Prakerja Periode Gelombang Pendaftaran Tahun 2020”. Hasil penelitian Audi menjelaskan bahwa implementasi kebijakan kartu prakerja pada tahun 2020 sudah berjalan, akan tetapi pada pelaksanaannya masih belum baik. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, pendekatan yang digunakan penulis yaitu fenomenology dengan pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi serta analisis teori yang digunakan penulis menggunakan teori efektivitas program kartu prakerja. Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada subyek yang digunakan terkait program bantuan pemerintah melalui program kartu prakerja.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Siti Dwi Yana, “Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Membangun Sumberdaya Manusia Di Tengah Pandemi,” *Jurnal Investasi Islam* Vol 6 No 1 (2021): 12.

<sup>29</sup> Audi Fadillah, “Implementasi Kebijakan Kartu Prakerja Periode Gelombang Pendaftaran Tahun 2020” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022), 83.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif dengan jenis *fenomenology*. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang dilakukan dengan mencoba mengungkapkan situasi sosial yang telah atau sedang terjadi dengan fakta yang ada berdasarkan data yang valid secara alamiah dan diolah dengan kata-kata.<sup>30</sup>

Metode kualitatif deskriptif sebab adanya kegiatan penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.<sup>31</sup>

### **2. Kehadiran Peneliti**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dan peneliti berperan sebagai instrumen penentu dalam memperoleh data kualitatif. Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Peneliti akan ikut secara langsung ke lapangan, mulai dari tahap analisis *fenomenology*, tahap *focused and selection*,

---

<sup>30</sup> A Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 350.

<sup>31</sup> Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 11.



mengumpulkan data, melakukan analisis dan membuat kesimpulan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki peran utama yaitu mengamati dan menganalisis apa yang sedang terjadi secara langsung di lapangan kemudian disimpulkan untuk dijadikan hasil atau jawaban dalam melakukan penelitian.

### **3. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan mulai 10 – 15 April 2023 di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo merupakan tempat dilakukannya penelitian untuk mengetahui fakta dan data yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Adapun alasan pengambilan lokasi penelitian di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo adalah Kecamatan tersebut dalam daftar penerima manfaat program kartu prakerja paling tinggi diantara Kecamatan yang lain untuk itu diharapkan masyarakat Kecamatan ini dapat memanfaatkan dengan baik insentif yang telah diberikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. selain itu, untuk mengetahui upaya penyelenggara dan pihak Kecamatan dalam memaksimalkan program pemerintah melalui prakerja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**P O N O R O G O**

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data menurut Nuzulla Agustina adalah keterangan mengenai suatu hal yang sudah sering terjadi dan merupakan himpunan fakta, angka, grafik table, gambar, lambing, kata, huruf, yang menyatakan suatu pemikiran, objek, serta kondisi dan situasi.<sup>32</sup>

Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder :

- b. Sumber data primer sendiri adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Penelitian ini menggunakan sumber primer yakni dari masyarakat yang mendapatkan manfaat dari kartu prakerja dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan program Kabupaten Ponorogo.
- c. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti dari berbagai bahan Pustaka yang ada baik itu jurnal, buku, media cetak, catatan, skripsi, ataupun lain sebagainya yang memiliki sifat tertulis dan ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang digunakan dalam telaah konsep dan teori.

---

<sup>32</sup> Moleong L.J, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 38.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan berdasarkan masyarakat yang telah mengikuti pelatihan pada program prakerja serta mendapatkan insentif pada Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sebagai populasi. Tujuan penelitian dicapai dengan melakukan pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Proses pengumpulan data ini merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian. Selain itu hasil dan kesimpulan yang diperoleh menjadi tidak teratur apabila pengumpulan data tidak dilakukan dengan benar. Oleh karena itu peneliti harus menentukan dengan tepat mengenai teknik yang akan dipakai. Untuk teknik pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan adanya sebuah tanya jawab dengan adanya pedoman terlebih dahulu yang dilakukan secara lisan yang terdiri dari pewawancara dan narasumber atau informan dengan begitu wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur karena adanya pedoman yang digunakan agar pertanyaan dan data yang didapatkan dapat tersusun serta lengkap.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2017), 137.

b. Observasi

Observasi merupakan sebuah langkah dalam melakukan proses pengumpulan data dimana adanya kegiatan mencatat, mengamati dan kemudian melakukan Analisa sampai pada akhirnya membuat sebuah kesimpulan terhadap peristiwa atau fenomena yang sedang dikaji dalam hal ini adalah terkait dengan adanya program kartu prakerja pada masyarakat yang telah mendapatkan manfaatnya baik itu insentif maupun pelatihannya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah langkah atau proses dalam mengumpulkan data yang terkait dengan mencatat berbagai media baik bentuk foto atau, video yang didapatkan pada lokasi penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi dokumentasinya adalah foto dan beberapa dokumentasi data yang diperlukan.<sup>34</sup>

## 6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian terpenting dalam melakukan penelitian. Hasil telaah pustaka yang bersumber dari buku, jurnal atau pengumpulan data langsung melalui wawancara maupun observasi di lapangan, kemudian didiskusikan. Pengolahan data yang baik mampu menyelesaikan proses selanjutnya, sehingga data bisa digunakan sebagai alat mereduksi dan menanta data untuk dianalisis dan

---

<sup>34</sup> Ibid.,

interpretasi, yang pada akhirnya hasil dari pengolahan data bisa dijadikan sebagai dasar yang kuat untuk membuktikan suatu permasalahan.<sup>35</sup>

## 7. Teknik Analisis Data

Sugiyono mengemukakan bahwa analisis data merupakan sebuah proses dalam melakukan penyusunan data yang diperoleh baik itu wawancara, kemudian catatan yang telah dilakukan, kemudian hasil dari observasi dan dokumentasi dengan cara melakukan organisasi menjadi unit kategori sintesa serta menjadi pola yang kemudian dilakukan pemilahan mana yang penting dan dapat digunakan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Analisis data ini menggunakan metode interaktif oleh Miles & Huberman. Analisis data model interaktif ini memiliki tiga komponen: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau validasi.<sup>36</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Secara lebih jelas dan lebih detail, proses analisis data bentuk interaksi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Reduksi data merupakan proses memilih, kemudian melakukan pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan juga pengabstrakan yang timbul dari catatan lapangan. Reduksi data juga termasuk

---

<sup>35</sup> Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Pt Kanisius, 2021), 34.

<sup>36</sup> Analisis data dicetuskan oleh Miles & Huberman dijelaskan oleh Ambarwati, *Metode Penelitian Kualitatif* (Pati: CV Al Qalam Media Lestari, 2022), 166.

dalam bagian dari analisis, pencatatan, merangkum dan mereduksi data sangat penting dilakukan oleh peneliti hal ini dikarenakan data yang diperoleh di lapangan biasanya terlalu banyak dan tak jarang tidak terfokus, kemudian penyebab lain data terlalu banyak adalah perpanjangan waktu dalam melakukan pengumpulan data di lapangan, jika tidak dilakukan penyederhanaan ataupun rangkuman maka bisa terjadi kerancuan perolehan data. Dengan demikian data yang terkumpul jika sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, lebih rinci dan juga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam proses reduksi data harus dilakukan dengan teliti dan rinci hal ini menghindari adanya data yang penting akan tetapi terlewatkan untuk di reduksi, sehingga proses reduksi data menjadi proses yang berat yang harus dilakukan dalam penelitian kualitatif.

- b. Display Data merupakan proses penyajian data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk tabel yang berisi daftar klasifikasi setiap data dalam bentuk bagan maupun narasi yang berisi penjelasan deskripsi tentang data yang diperoleh. Data yang disajikan perlu disusun secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu seperti uraian konsep kategori, dan lain-lain sehingga mudah dipahami pembaca. Data yang telah tersusun

secara sistematis akan memudahkan pembaca memahami konsep, kategori serta hubungan dan perbedaan masing-masing pola atau kategori.

- c. Kesimpulan merupakan langkah ketiga setelah penyajian data dalam pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Pada penelitian kualitatif, kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan. Selain memberikan jawaban atas rumusan, kesimpulan juga harus menghasilkan temuan baru di bidang ilmu yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi tentang suatu objek garis miring fenomena yang sebelumnya masih samar, setelah diteliti menjadi lebih jelas, dapat pula berupa hipotesis bahkan teori baru.<sup>37</sup>

## 8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Menurut Zulfadrial keabsahan data merupakan konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*).<sup>38</sup> Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data yang tepat, salah satunya yaitu dengan proses triangulasi meliputi hal berikut:

- a. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas (*credibility*) merupakan uji reliabilitas terhadap data penelitian kualitatif, uji reliabilitas ini memiliki dua fungsi yaitu, fungsi pertama adalah melakukan penilaian

---

<sup>37</sup> Ibid.,

<sup>38</sup> Zulfadrial, *Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Yuma Pustaka, 2012), 89.

untuk mendapatkan tingkat kepercayaan terhadap hasil kami dan fungsi kedua adalah untuk menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap temuan kami dengan menunjukkan suatu realitas ganda yang diinginkan.

Dalam penelitian ini untuk uji kredibilitas (*credibility*) peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan data, atau sering disebut bahwa triangulasi sebagai pembanding data. Selain itu, triangulasi merupakan teknik verifikasi keabsahan data yang menggabungkan teknik pengumpulan data yang berbeda dan sumber data yang ada, triangulasi ini menggunakan sesuatu selain data penelitian, untuk tujuan memverifikasi atau membandingkan data penelitian yang diperoleh.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek kembali tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh berdasarkan waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Penerapan metode ini dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara dan dokumentasi. Selain itu perbandingan terkait apa yang dilakukan responden, dengan keterangan wawancara yang dilakukan secara konsisten dan



ditinjau dengan data dokumentasi berupa foto serta data lainnya seperti jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

b. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Uji transferabilitas (*transferability*) adalah teknik untuk menguji validitas *eksternal* didalam penelitian kualitatif. Uji ini dapat menunjukkan seberapa akurat atau dapat diterapkannya hasil studi terhadap populasi dari mana sampel diambil.

Untuk dapat menerapkan uji transferabilitas kedalam penelitian ini, nantinya peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan juga secara sistematis terhadap hasil penelitian. Uraian rinci hasil penelitian dimaksudkan agar jelas dan sistematis agar penelitian dapat dipahami oleh orang lain dan agar hasil penelitian dapat diterapkan pada sampel tempat penelitian ini dilakukan.



## **G. Sitematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ditulis untuk memberikan pemahaman terhadap apa yang akan tergambar dalam skripsi penelitian dan memahami informasi yang disampaikan. Berikut sistematika yang disusun:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berfungsi sebagai gambaran umum. Peneliti akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

Peneliti akan menguraikan tentang kajian teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi meliputi implelementasi program kartu prakerja, efektifitas, dan kesejahteraan masyarakat.

### **BAB III PAPARAN DATA**

Pada bab III ini akan membahas mengenai gambaran umum (Lokasi Kecamatan Sampung Ponorogo dan Struktur Organisasi Kecamatan Sampung), Implementasi program kartu prakerja, Strategi program kartu prakerja dalam proses seleksi, Efektivitas program kartu prakerja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

## **BAB IV ANALISIS DATA**

Analisis data dari pihak penulis untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Analisisnya meliputi Implementasi program kartu prakerja, Strategi program kartu prakerja dalam proses seleksi, Efektivitas program kartu prakerja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dalam perspektif ekonomi islam.

## **BAB V PENUTUP**

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran dirumuskan berdasarkan temuan penelitian, memuat uraian tentang tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

Saran ditujukan terhadap dua hal, yaitu:

- 1) Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan.
- 2) Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.

## BAB II

### EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU PRAKERJA

#### A. Prakerja

##### 1. Pengertian Kartu Prakerja

Kartu Prakerja adalah program pemerintah Indonesia dalam bentuk bantuan biaya pelatihan kepada masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kemampuan atau meningkatkan keterampilan praktis untuk dunia kerja. Peran kartu prakerja ialah mempersiapkan tenaga kerja yang belum memiliki pekerjaan dengan memberikan sebuah *treatment* yakni, meningkatkan *softskill* yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penerima manfaat program kartu prakerja dengan wadah yang disiapkan pemerintah melalui platform yang disediakan, sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Presiden No. 76 tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja bahwa tujuan program kartu prakerja adalah agar meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM), mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan *produktivitas* dan daya saing angkatan kerja serta mengembangkan kewirausahaan.<sup>39</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kartu prakerja merupakan suatu identitas yang diberikan kepada seorang yang

---

<sup>39</sup> “Kartu Prakerja,” n.d., <https://www.prakerja.go.id/>. Diakses pada Selasa 3 Januari 2023 Jam 23.10 WIB

telah resmi terdaftar sebagai calon peserta program kartu prakerja yang dibuat oleh pemerintah guna untuk masyarakat yang ingin meningkatkan keahliannya dengan mengikuti pelatihan yang telah disediakan oleh kementerian ketenagakerjaan.

## 2. Tujuan Kartu Prakerja

Program kartu prakerja bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan. Kartu prakerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari kerja, namun juga untuk pekerja atau buruh yang terkena PHK dan pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pelaku usaha mikro dan kecil. Untuk merespon dampak dari Covid-19, Program kartu Prakerja untuk sementara waktu akan diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak penghidupannya.<sup>40</sup>

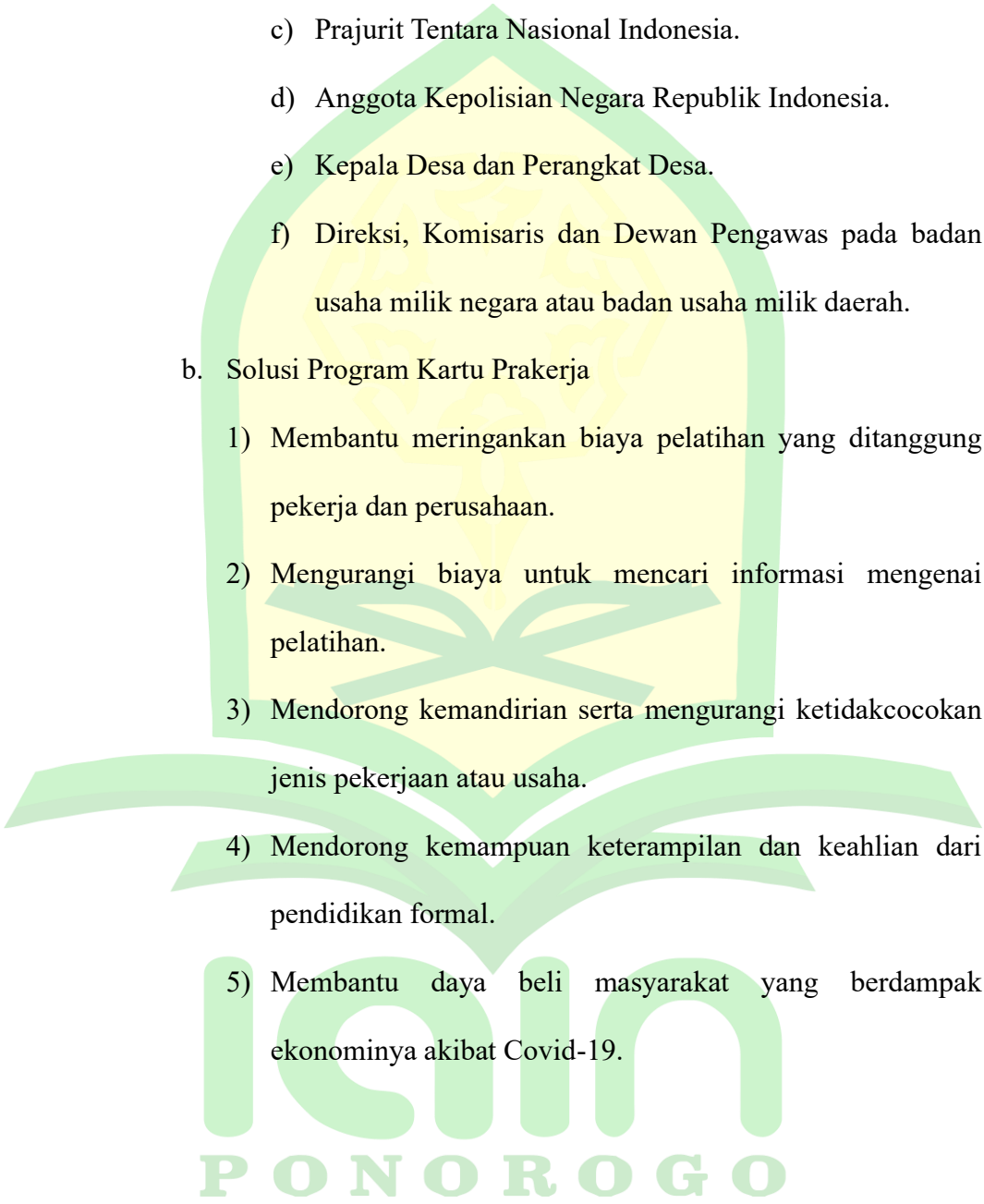
### a. Syarat Kartu Prakerja

Adapun syarat dalam mengikuti kartu prakerja yaitu:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Berusia 18-64 tahun
- 3) Tidak sedang mengikuti pendidikan formal
- 4) Bukan Pejabat Negara yaitu:

---

<sup>40</sup> Peraturan Presiden, “Perpres No 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja,” 1.

- 
- a) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - b) Aparatur Sipil Negara.
  - c) Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
  - d) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - e) Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - f) Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- b. Solusi Program Kartu Prakerja
- 1) Membantu meringankan biaya pelatihan yang ditanggung pekerja dan perusahaan.
  - 2) Mengurangi biaya untuk mencari informasi mengenai pelatihan.
  - 3) Mendorong kemandirian serta mengurangi ketidakcocokan jenis pekerjaan atau usaha.
  - 4) Mendorong kemampuan keterampilan dan keahlian dari pendidikan formal.
  - 5) Membantu daya beli masyarakat yang berdampak ekonominya akibat Covid-19.

### 3. Implementasi Dalam Mengikuti Kartu Prakerja

Implementasi program kartu prakerja terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Adapun ketentuan-ketentuannya sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran - masuk ke situs [prakerja.go.id](http://prakerja.go.id) dan buat akun dengan data diri.
- 2) Seleksi - ikuti tes motivasi dan kemampuan dasar untuk bisa bergabung ke gelombang pendaftaran dan tunggu pengumuman hasilnya. Apabila seleksi lolos dalam jangka waktu 60 hari tidak dibelikan pelatihan maka insentif akan dikembalikan kepada Negara.
- 3) Pilih pelatihan - pilih pelatihan dengan saldo yang telah diberikan oleh prakerja sebesar Rp 1.500.000 di mitra platform digital resmi dan bayar menggunakan kartu prakerja.
- 4) Ikuti pelatihan - selesaikan pelatihan online dan dapatkan sertifikat elektronik.
- 5) Beri ulasan dan rating - berikan ulasan dan rating terhadap pelatihan yang telah diikuti
- 6) Insentif pasca pelatihan - dapat insentif Rp 600 ribu/bulan selama 4 bulan setelah menyelesaikan pelatihan.

- 7) Insentif pasca survey kekerjaan - isi 3 kali survey yang diberikan pasca pelatihan dan dapatkan insentif Rp 50 ribu untuk setiap surveynya.<sup>41</sup>

### **3. Analisis Implementasi William Dun**

Analisis kebijakan merupakan penelitian sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Ruang lingkup dan metode analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan.

Penelitian kebijakan sedapat mungkin melihat berbagai aspek dari kebijakan agar dapat menghasilkan informasi yang lengkap. Informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan serta masalah-masalah yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan menjadi fokus dari analisis kebijakan.

Rekomendasi yang dihasilkan dari proses penelitian kebijakan dapat berupa dukungan penuh terhadap kebijakan, kritik dan saran mengenai bagian mana dari kebijakan yang perlu diperbaiki, atau dapat juga berupa rekomendasi agar kebijakan tidak lagi diterapkan.

---

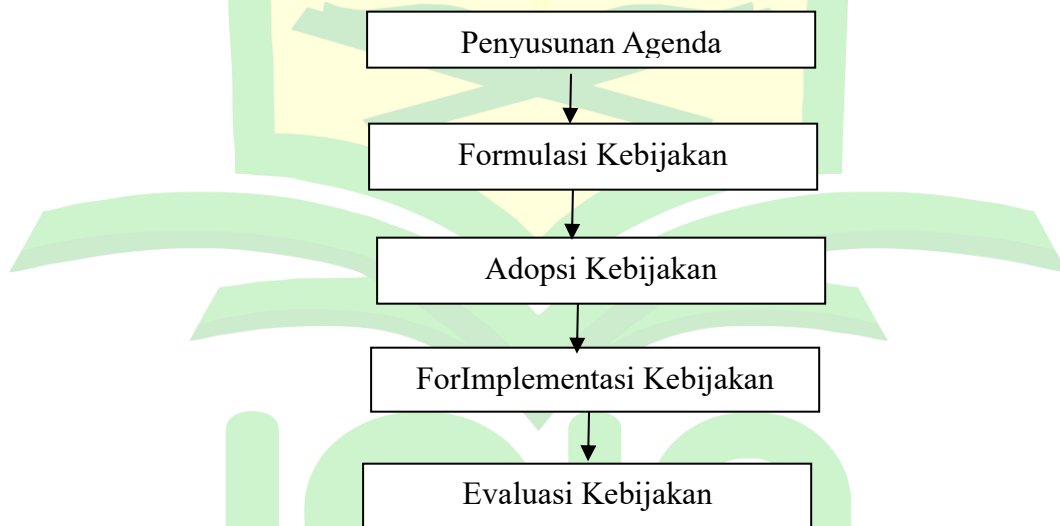
<sup>41</sup> Ibid., 3



Informasi yang berkaitan dengan kebijakan berupa masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia, yaitu: definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi dan evaluasi. Masing-masing dari informasi kebijakan berkaitan dengan prosedur kebijakan.

Dalam proses pembuatan kebijakan publik, dibagi dalam beberapa tahapan yang dikelompokkan unuk mempermudah dalam menganalisis kebijakan publik. Tahapan-tahapan kebijakan publik yang sudah terkenal dpat dikelompokkan oleh William D sebagai berikut: <sup>42</sup>

#### **Gambar Tahapan Pembuatan Implementasi Kebijakan**



Sumber: William Dunn

Kelima informasi yang terkait dengan kebijakan saling berkaitan satu sama lain seperti ditunjukkan dalam gambar. Tanda panah yang menghubungkan tiap komponen informasi menggambarkan proses

---

<sup>42</sup> William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Cetakan Kelima*. (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press., 2013).

dinamis dimana satu tipe informasi dipindahkan ke informasi lain dengan menggunakan prosedur analisis kebijakan yang tepat.

Perumusan masalah atau definisi merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi mengenai masalah-masalah yang menimbulkan masalah kebijakan melalui prosedur perumusan masalah dapat diidentifikasi mengenai masalah kebijakan yang tepat yang akan dijadikan sebagai fokus. Peramalan atau prediksi berisi informasi mengenai kondisi yang mungkin dapat terjadi pada masa mendatang sebagai konsekuensi dari penerapan kebijakan. Rekomendasi atau preskripsi menyediakan informasi mengenai kegunaan dari dari konsekuensi di masa mendatang dari suatu pemecahan masalah. Pemantauan atau deskripsi menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dari penerapan kebijakan. Evaluasi menyediakan informasi mengenai kegunaan dari pemecahan suatu masalah.

## **B. Efektivitas**

### **1. Pengertian Efektivitas**

Secara bahasa efektivitas diambil dari kata “efek” yang artinya akibat atau pengaruh. Secara umum, efektivitas menunjukkan keberhasilan tujuan tergantung tercapai atau tidak program tersebut. Jika hasilnya semakin dekat dengan target, maka semakin tinggi efisiensinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas adalah kegiatan memberikan hasil yang memuaskan dengan

menggunakan waktu dan metode terbaik.<sup>43</sup> Dapat disimpulkan bahwa efektivitas pada dasarnya mengacu terhadap suatu ukuran akuisisi yang mana terdapat kesesuaian antara hasil terhadap rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Van Fleet efektif adalah melakukan sesuatu dengan baik dan benar sesuai dengan cara dan ketepatan waktu yang telah ditetapkan.<sup>44</sup> Sedangkan konsep efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau cara yang tepat untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>45</sup> Dari pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu tujuan ditinjau dari kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah dicapai dalam manajemen, serta tujuan apa yang telah dicapai untuk menciptakan kreativitas.

## **2. Konsep Efektivitas**

Konsep efektivitas menunjuk pada seberapa jauh organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsinya sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal dari bentuk program tersebut yang ditinjau dari beberapa aspek diantaranya:

---

<sup>43</sup> J.S Badudu, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Harapan, 1994), 271.

<sup>44</sup> Sofyan Safri Harahap, *Manajemen Kontemporer* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996), 13.

<sup>45</sup> Nurrahmi Hayani, *Pengantar Manajemen* (Pekanbaru: Benteng Media, 2014), 5.

a. Ukuran Efektivitas

Pengukuran pada efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila dalam organisasi berhasil mencapai tujuan, maka dapat dikatakan organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Menurut John P Campbell pada bukunya *Productivity in Organization* menjelaskan bagaimana pengukuran efektivitas secara umum dan bisa digunakan oleh organisasi lainnya dengan cara sebagai berikut:

1) Keberhasilan program, efektivitas keberhasilan program dapat dilakukan dengan cara melaksanakan program-program kerja sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat dan disetujui oleh pihak-pihak yang terkait pada awal sebelumnya. Keberhasilan program dapat ditinjau dari proses program dan mekanisme saat berada dilapangan mulai dari masyarakat sampai ke lingkungan yang harus diperhatikan.

2) Keberhasilan sasaran, efektivitas ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam menjalankan yang terdapat aspek *output*. Artinya, efektivitas dapat diukur dari tingkat *output* dari sebuah program yang dijalankan

dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu pada implementasi sasaran pembuatan kebijakan harus dianalisis dengan cermat dan baik agar nantinya program sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada masyarakat.<sup>46</sup>

3) Kepuasan terhadap program, kepuasan merupakan salah satu indikator efektivitas yang mengacu pada sebuah keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan konsumen atau pengguna. Kepuasan ini menjadi pengaruh besar terhadap berjalannya suatu kebijakan karena apabila program tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat maka akan timbul reaksi yang tidak diinginkan.

4) Tingkat *input* dan *output*, dalam efektivitas tingkat *input* dan *output* sangat berpengaruh karena jika *output* lebih besar dari pada *input* maka bisa dikatakan efisien dan sebaliknya bila *input* lebih besar dari pada *output* maka dapat dikatakan tidak efisien. Dalam artiannya *input* dan *output* ini menjadi pengaruh besar untuk bisa melihat efektivitas suatu program.

---

<sup>46</sup> Efektivitas dicetuskan oleh John P Campbell dijelaskan oleh Hessel Nogi S Tangkilisan, *Manajemen Publik* (Grasindo, 2005), 139.

5) Pencapaian tujuan menyeluruh, dalam hal ini dapat dilihat dari sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan menyeluruh merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum efektivitas organisasi.<sup>47</sup>

b. Indikator efektivitas terdapat lima indikator atau ukuran dari efektivitas pelatihan, yaitu sebagai berikut:

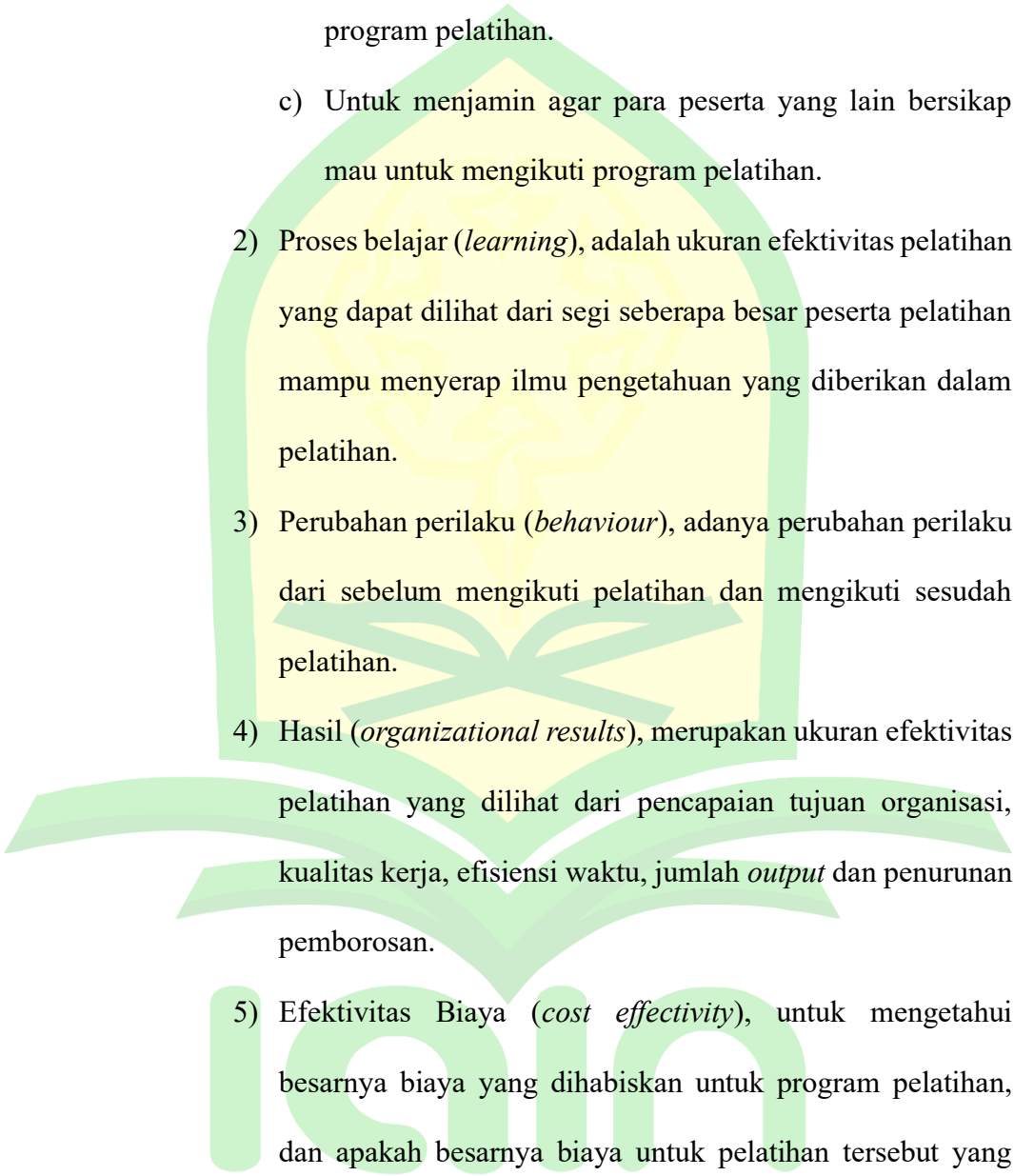
1) Reaksi (*reactions*), merupakan ukuran pada efektivitas pelatihan yang dilihat dari reaksi peserta yang mengikuti, terutama reaksi yang bersifat langsung. Seperti menyediakan kuesioner pada akhir pelatihan, para peserta yang mengikuti pelatihan ditanya tentang sejauh mana mereka puas terhadap pelatihan secara keseluruhan, terhadap pelatih atau instruktur, isinya, dan materi yang disampaikan.<sup>48</sup>

Didasarkan pada beberapa alasan utama, usaha untuk mendapatkan opini para peserta tentang pelatihan ini, seperti:

---

<sup>47</sup> Ibid.,

<sup>48</sup> Ratna Ekasari, *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdaya Ekonomi* (Malang: AE Publishing, 2020), 154.

- 
- a) Untuk mengetahui sejauh mana para peserta pelatihan merasa puas dengan program yang diikutinya.
  - b) Untuk tujuan dilaksanakannya beberapa revisi atas program pelatihan.
  - c) Untuk menjamin agar para peserta yang lain bersikap mau untuk mengikuti program pelatihan.
- 2) Proses belajar (*learning*), adalah ukuran efektivitas pelatihan yang dapat dilihat dari segi seberapa besar peserta pelatihan mampu menyerap ilmu pengetahuan yang diberikan dalam pelatihan.
  - 3) Perubahan perilaku (*behaviour*), adanya perubahan perilaku dari sebelum mengikuti pelatihan dan mengikuti sesudah pelatihan.
  - 4) Hasil (*organizational results*), merupakan ukuran efektivitas pelatihan yang dilihat dari pencapaian tujuan organisasi, kualitas kerja, efisiensi waktu, jumlah *output* dan penurunan pemborosan.
  - 5) Efektivitas Biaya (*cost effectivity*), untuk mengetahui besarnya biaya yang dihabiskan untuk program pelatihan, dan apakah besarnya biaya untuk pelatihan tersebut yang

terhitung kecil atau besar dibandingkan dengan permasalahan yang dialami.<sup>49</sup>

## C. Kesejahteraan

### 1. Pengertian Kesejahteraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh W.J.S. Poerwodarminto, kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup). Sementara sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan kesukaran dan sebagainya).<sup>50</sup> Pemerintah Republik Indonesia mendefinisikan kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>51</sup>

Pembangunan dibidang kesejahteraan sosial mestinya merupakan usaha untuk menciptakan lembaga-lembaga yang menjamin keberlanjutan proses pembangunan tersebut, yang sejauh ini pemerintah telah berusaha untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat dengan tujuan untuk menjamin kebutuhan ekonomi manusia, standar kesehatan, dan kondisi kehidupan yang layak. Selain itu, juga untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga Negara lainnya, peningkatan derajat harga diri setinggi mungkin,

---

<sup>49</sup> Ridho Rokamah, "Efektifitas Program Ppa-Pkh Di Kabupaten Ponorogo: Tinjauan Yuridis Sosiologis," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 12, no. 1 (2015).

<sup>50</sup> Richard M Streers, *Efektivitas Organisasi*, Cetakan ke-2 (Jakarta: Erlangga, 1985), 209-211.

<sup>51</sup> W.J.S Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), 887.



kesehatan berfikir, dan melakukan kegiatan tanpa gangguan, sesuai dengan hak asasi seperti yang dimiliki sesamanya.<sup>52</sup>

## 2. Konsep Kesejahteraan

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>53</sup> Dari Undang-Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Kebutuhan material berhubungan dengan pendapatan yang dapat mewujudkan kebutuhan *primer, sekunder, tersier* dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual berhubungan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentraman hidup.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, dan sosial.

---

<sup>52</sup> Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman Dan Takwa* (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2016), 40.

<sup>53</sup> Peraturan Presiden, “Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial,” n.d., 1, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/11tahun2009uu.htm>. diakses pada Minggu 5 Februari 2023 pukul 16.24 WIB.

a. Konsumsi dan pengeluaran

Indikator pengeluaran dapat digolongkan menjadi 3 item, yaitu:

1) Tinggi

Kesejahteraan seseorang berdasarkan tingkat konsumsi dan pengeluarannya dapat dikatakan tinggi apabila pengeluaran keluarga terhitung per bulan sebesar >Rp. 4.500.000,-.

2) Sedang

Kriteria kesejahteraan ekonomi yang termasuk dalam kategori sedang apabila pengeluaran keluarga per bulan sebesar Rp. 1.000.000 - Rp. 4.500.000.

3) Rendah

Kriteria kesejahteraan ekonomi jika dilihat dari tingkat konsumsi dan pengeluaran termasuk dalam kategori rendah apabila pengeluaran keluarga perbulan sebesar <Rp. 1.000.000.<sup>54</sup>

b. Keadaan tempat tinggal

Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian digolongkan menjadi 3 yaitu:

---

<sup>54</sup> Ibid., 53

### 1) Permanen

Kriteria permanen ditentukan oleh kualitas dinding, atap dan lantai. Bangunan rumah permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok atau kayu kualitas tinggi, lantai terbuat dari ubin, keramik, maupun kayu yang berkualitas tinggi dan atapnya terbuat dari seng, genting, sirap, dan asbes.

### 2) Semi Permanen

Rumah semi permanen adalah rumah yang dindingnya setengah tembok atau bata tanpa plaster atau kayu kualitas rendah, lantainya dari ubin, semen, kayu kualitas rendah dan atapnya seng, genting, sirap, dan asbes.

### 3) *Non* Permanen

Sedangkan rumah tidak permanen adalah rumah yang dindingnya sangat sederhana (bamboo, papan, dan daun) lantainya dari tanah dan atapnya dari daun-daunan atau atap campuran genting dan seng bekas, dan sejenisnya.<sup>55</sup>

### c. Fasilitas tempat tinggal

Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum,

---

<sup>55</sup> Ibid., 57

sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian digolongkan menjadi 3 yaitu.<sup>56</sup>

1) Lengkap

Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal sudah mempunyai 12 item yang disebutkan di atas dengan kondisi baik atau layak pakai.

2) Cukup

Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal mempunyai fasilitas setidaknya lebih dari 6 item yang disebutkan dengan kondisi layak pakai.

3) Kurang

Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal mempunyai fasilitas kurang dari 6 item yang disebutkan dengan kondisi layak pakai.

d. Kesehatan

Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 2 item, yaitu:

1) Bagus

Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga setidaknya <25% kehidupan mereka yang berada dalam kondisi sakit.

---

<sup>56</sup> Ibid., 62

2) Cukup

Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga mempunyai persentase kesehatan berada pada kisaran 25%-50% dibandingkan dengan kondisi sakit.

3) Kurang

Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga mempunyai persentase kesehatan di bawah rata-rata atau >50% kehidupan mereka yang berada dalam kondisi sakit.<sup>57</sup>

e. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan

Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian digolongkan menjadi 3 yaitu:

1) Mudah

Golongan ini berarti apabila 5 item dari penjelasan di atas sudah terpenuhi semua.

2) Cukup

Golongan ini berarti apabila 5 item dari penjelasan di atas ada yang tidak terpenuhi, namun tidak lebih dari 2 item atau setidaknya 3 item dari indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan dapat terpenuhi.

---

<sup>57</sup> Ibid., 19

3) Sulit

Golongan ini berarti apabila 5 item dari penjelasan di atas lebih banyak yang tidak terpenuhi atau lebih dari 3 item indikator tidak terpenuhi.

f. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan

Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian digolongkan menjadi 3 yaitu:

1) Mudah

Golongan ini berarti 3 indikator dari kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan sudah terpenuhi.

2) Cukup

Golongan ini berarti dari 3 indikator kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan salah satunya ada yang tidak terpenuhi.<sup>58</sup>

3) Sulit

Golongan ini berarti 3 indikator dari kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan hanya 1 indikator yang dapat dipenuhi.

---

<sup>58</sup> Ibid., 32

g. Kemudahan mendapatkan transportasi

Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan. Dari 3 item tersebut kemudian digolongkan menjadi 3 yaitu:

1) Mudah

Golongan ini menunjukkan bahwa 3 item dari kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan mendapat transportasi sudah dapat terpenuhi semua.

2) Cukup

Golongan ini menunjukkan bahwa 3 item dari kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan mendapat transportasi sudah ada salah satu indikator yang tidak terpenuhi.

3) Sulit

Golongan ini menunjukkan bahwa 3 item dari kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan mendapat transportasi hanya 1 indikator yang terpenuhi.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Ibid., 80

### 3. Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam kini telah menjadi pembahasan tersendiri pada masa *modern* ini. Kajian-kajian telah banyak dilakukan oleh para ulama mengingat pada masa awal pertumbuhan Islam, ekonomi Islam belum muncul sebagai sebuah disiplin keilmuan. Meskipun demikian, pondasi atau landasan dasarnya telah terealisasi di dalam sejarah Islam, sehingga hal inilah yang merupakan warisan yang terus menjadi sumber bagi berkembangnya nilai-nilai ekonomi Islam. Para ulama berperan besar di dalam memberikan penjelasan kepada para pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan muamalahnya.<sup>60</sup>

Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (*Maqasid al-Syariah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi.<sup>61</sup> Untuk mencapai tujuan *syara* agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Eko Sudarmanto, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), 97.

<sup>61</sup> Nurul Alfiatus Sholikhah, "Peran Lembaga Filantropi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)," *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 1, no. 1 (2021): 27–42.

<sup>62</sup> Ani Nurul Imtihanah, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest* (Yogyakarta: CV GRE PUBLISHING, 2018), 21.



Konsep kesejahteraan tersebut dalam pandangan ekonomi Islam masih mencakup hanya dimensi materi. Ekonomi Islam menghendaki kesejahteraan itu juga mencakup keseluruhan unsur materi dan *non* materi (*psikis*). Hal ini disebabkan kepuasan manusia itu terletak pada unsur-unsur non materi.<sup>63</sup>

#### 4. Kesejahteraan Menurut al-Qur'an

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari *rahmatan lil alamin* yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya.

Banyak ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan. Allah SWT. Berfirman dalam surah Al-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

---

<sup>63</sup> Didi Suardi, "Strategi Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Umat," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 02 (2020): 68–80.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.<sup>64</sup>

## 5. Kesejahteraan pada Masa Rasulullah SAW

Ajaran Islam telah menjelaskan bahwa sesungguhnya tujuan dasar Islam adalah terwujudnya kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat. Dalam prakteknya, Rasulullah SAW membangun suatu perekonomian yang dulunya dari titik terendah menjadi suatu perekonomian dunia yang mampu keluar dari jazirah Arab. Pemerintahan yang dibangun Rasulullah SAW di Madinah mampu menciptakan suatu aktivitas perekonomian yang membawa kemakmuran dan menyeluruh, serta memberikan pengaruh pada masa itu.<sup>65</sup>

Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan atau kemakmuran. Nabi Muhammad SAW memperkenalkan sistem ekonomi Islam. Hal ini berawal dari kerja sama antara kaum Muhajirin dan Anshar. Sistem ekonomi Islam yang diperkenalkan, antara lain, *syirkah*, *qirad*, dan *khiyar* dalam perdagangan. Selain itu, juga

---

<sup>64</sup> Al-Qur'an, 16:97.

<sup>65</sup> Didi Suardi, “Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam,” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 327.

diperkenalkan sistem *musaqah*, *mukhabarah*, dan *muzara'ah* dalam bidang pertanian dan perkebunan. Para sahabat juga melakukan perdagangan dengan penuh kejujuran. Mereka tidak mengurangi timbangan di dalam berdagang.

Semenjak hijrah ke Madinah, kehidupan telah banyak berubah. Para sahabat Nabi Muhammad SAW dari kaum Muhajirin bersama-sama dengan penduduk lokal Madinah dari kaum Anshar dalam membangun kegiatan ekonomi. Berbagai bidang ditekuni oleh beliau dan para sahabatnya baik itu pertanian, perkebunan, perdagangan dan peternakan. Pasar-pasar dibangun di Madinah. Kebun kurma menghasilkan panen yang melimpah. Peternakan kambing menghasilkan susu yang siap dipasarkan maupun hanya sekedar untuk diminum. Dalam sejarah, dikenal tokoh Islam yang terkenal dengan kekayaannya dan kepiawaiannya dalam berdagang dan berbagai bidang lainnya.

Mereka adalah Abdurahman bin A'waf, Abu Bakr, 'Umar bin al-Khattab, dan sebagainya. Mereka sadar akan dapat hidup di Madinah hanya dengan usaha mereka sendiri. Masyarakat Madinah terus berupaya meningkatkan aktivitas ekonomi dengan etos kerja yang tinggi. Ibadah dan kerja adalah dua jenis aktivitas ukhrawi dan duniawi yang menghiasi hari-hari mereka silih berganti. Pada awal tahun kedua Hijrah, Allah SWT sudah mewajibkan kaum muslimin membayar zakat.

Tentu saja, zakat yang diwajibkan hanya bagi mereka yang telah berkecukupan.<sup>66</sup>

Kesejahteraan ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral. Konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan (*falah*) mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya 5 prinsip dalam *maqashid syariah*, yakni melindungi agama (*ad-ddin*), melindungi jiwa (*annafs*), melindungi akal (*al-aql*), melindungi keturunan (*an-nasl*) dan melindungi harta (*al-mal*).<sup>67</sup> Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kesejahteraan ekonomi mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.
- b. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan dan sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil.
- c. Penggunaan berdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir.

---

<sup>66</sup> Saprida, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2021), 12.

<sup>67</sup> Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Kencana, 2014), 114.

- d. Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata.
- e. Menjamin kebebasan individu.
- f. Kesamaan hak dan peluang.
- g. Kerjasama dan keadilan.



## BAB III

### PAPARAN DATA EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU PRAKERJA

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Sampung merupakan Kecamatan yang termasuk dalam wilayah dari Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan sampung memiliki jarak kurang lebih 23 kilometer dari pusat kabupaten Ponorogo yakni pada arah barat laut. Kecamatan sampung menjadi batas wilayah antara kabupaten ponorogo dengan wilayah kabupaten wonogiri jawa tengah yang terletak pada sebelah barat. Secara geografis batas fisik dan letak ketinggian wilayah Kecamatan Sampung terdiri dari:

Batas sebelah Utara	: Kabupaten Magetan
Batas sebelah Timur	: Kecamatan Sukorejo
Batas sebelah Selatan	: Kecamatan Badegan
Batas sebelah Barat	: Kabupaten Wonogiri

Ketinggian pada kecamatan ini mencapai angka 91 – 381 mdpl. Wilayah Kecamatan Sampung terdiri dari 12 desa yaitu: Desa Pagerukir, Desa Gelangkulon, Desa Karangwuluh, Desa Glinggang, Desa Carangrejo, Desa Tulung, Desa Pohijo, Desa Jenangan, Desa Kunti, Desa Nglurup, Desa Sampung, Desa Ringinputih.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Kantor Kecamatan Sampung, “Letak Geografis Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo,” n.d., <https://sampung.ponorogo.go.id/category/pemerintahan/>. Diakses pada tanggal 10 April 2023, jam 09.00 WIB

Kecamatan sampung juga memiliki sebuah situs peninggalan sejarah atau situs purbakala yakni gua low yan terkenal yang didalamnya terdapat beberapa fosil hewan purbakala.

a. Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Sampung tahun 2021 berjumlah 39.843 jiwa terdiri dari 19.749 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 20.094 penduduk berjenis kelamin perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin berguna untuk melihat suatu perbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan yang merupakan salah satu indikator keseimbangan gender dalam kualitas. Jumlah penduduk di Kecamatan Sampung peningkatan ini disebabkan oleh keseimbangan antara angka kelahiran dan kematian ditambah imigrasi dan rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Sampung tergolong lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Berikut tabel jumlah penduduk Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.<sup>69</sup>

**Table 3.2 Jumlah Penduduk**

<b>Jumlah</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
39.843 jiwa	19.749 jiwa	20.094 jiwa

*Sumber: BPS Ponorogo*

<sup>69</sup> Siswi Harini, "Kecamatan Sampung Dalam Angka 2021," Badan Pusat Statistik, 2021, 11.

Berdasarkan struktur umur penduduk Kecamatan Sampung kebanyakan penduduk tergolong usia 15-64 tahun. Indikasi ini tergambar dari rasio kelompok umur.

**Table 3.3 Kelompok Usia**

Umur	Persentase
0-14	18%
15-64	69%
65 ke atas	13%

*Sumber: BPS Ponorogo*

Berdasarkan keadaan masyarakat ini akan mempengaruhi potensi yang dapat meningkatkan perkembangan berbagai bidang yang didukung oleh berbagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat di Kecamatan Sampung.

**b. Tingkat Pendidikan Penduduk**

Pendidikan yang dicapai oleh sebuah masyarakat tertentu penting untuk upaya melakukan pengembangan sumber daya

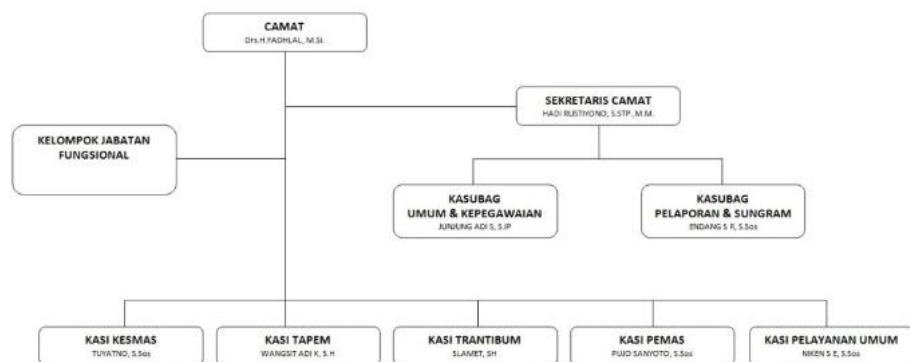


**Gambar 3.1 Tingkat Pendidikan**



manusia sebagai upaya melakukan pengembangan ekonomi pada suatu daerah. Pendidikan menjadi faktor seseorang dalam sebuah sistem dengan pola pikir yang baik dan juga menambah kualitas terhadap seseorang tersebut. Keadaan pendidikan di Kabupaten Ponorogo mayoritas adalah tamatan SMP sebagai berikut.<sup>70</sup>

c. Struktur Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo  
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo 2023



**Gambar 3.2 Struktur Kecamatan Sampung**

**B. Temuan Hasil Penelitian**

**1. Implementasi Program Kartu Prakerja di Kecamatan Sampung**

Keterlaksanaannya program kartu prakerja di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo tidak luput dengan adanya proses komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait baik itu jajaran dari pihak Kecamatan, jajaran kepala desa, warga dan tim terkait. Komunikasi

<sup>70</sup> Siswi Harini, “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ponorogo 2022,” Badan Pusat Statistik, 2022, 29.

yang dilakukan oleh pihak kecamatan dalam pelaksanaan program kartu prakerja yakni dengan melakukan agenda pertemuan yang dihadiri oleh pihak yang terkait. Berikut penuturan salah satu kepala desa di Kecamatan Sampung Ponorogo.

“Program kartu prakerja diawali dengan adanya pertemuan di kantor kecamatan mbak yakni sosialisasi yang dihadiri oleh seluruh kepala desa dan tim IT terkait dengan program kartu prakerja ini”.<sup>71</sup>

Hal selaras juga diungkapkan dari hasil wawancara dengan staf kecamatan Sampung sebagai berikut.

“ya mbak untuk proses komunikasi awal adalah dihadapkannya narasumber untuk melakukan sosialisasi kartu prakerja di kantor kecamatan yang dihadiri seluruh kepala desa dan tim IT masing-masing desa di pendopo kecamatan Sampung”.<sup>72</sup>

Selain mengadakan sosialisasi pemerintahan kecamatan sampung juga memberikan kesempatan komunikasi melalui media social baik itu berupa website dan halaman facebook serta twitter. Berikut hasil wawancara dengan staf kecamatan yang dilakukan oleh peneliti.

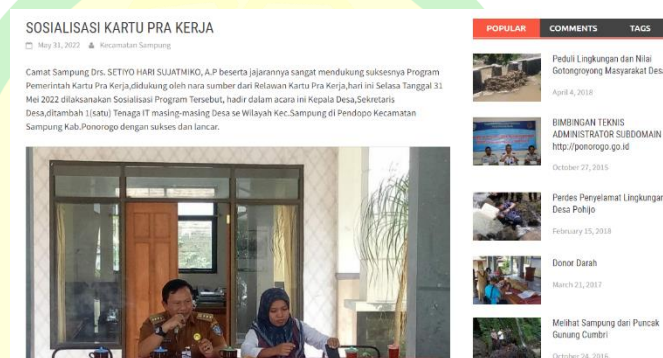
“iya tentu mbak, selain adanya sosialisasi laman pertanyaan dan penyebaran informasi juga kita lakukan di beberapa media misalnya website kecamatan sampung, terus tanya jawab di twitter sama di facebook mbak, jadi para kepala desa tidak harus ke kantor kecamatan untuk memperoleh informasi”

---

<sup>71</sup> Kades Sampung, *Wawancara*, 02 April 2023

<sup>72</sup> Hadi, *Wawancara*, 02 April 2023

Penuturan tersebut didukung dengan hasil temuan observasi peneliti pada situs website dari kecamatan Sampung yang membuat acara sosialisasi dan adanya beberapa kolom komentar terkait dengan program kecamatan. Berikut hasil temuan peneliti.



**Gambar 3.3 Sosialisasi Program Kartu Prakerja**

Selain adanya komunikasi yang baik dalam implementasi program diperlukannya sumber daya yang cukup. Berikut hasil wawancara dengan pihak staf kecamatan Sampung.

“Berkaitan sumber daya ini termasuk dengan sarana prasarana mbak, kemudian tim IT dan juga untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan serta sebagainya jadi ini nanti juga tergantung kuota juga mbak”.<sup>73</sup>

Hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan Mengacu pada Perpres No. 36 Tahun 2020 pasal 12, mendapatkan hasil bahwa penyaluran dana pada program prakerja sendiri digunakan untuk berbagai kegiatan seperti untuk melakukan pembiayaan proses pelatihan, kemudian memberikan insentif pengisian survei dan

<sup>73</sup> Tim IT Kecamatan Sampung, *Wawancara*, 02 April 2023

evaluasi program dan insentif biaya saat melakukan pelatihan dan proses pencarian kerja. Dana diberikan dengan cara bertahap selama kurun waktu yakni 4 bulan dengan rincian 600 ribu perbulannya, kemudian biaya pelatihan adalah 1 juta rupiah dan 150 ribu untuk insentif telah melakukan survei dan evaluasi sehingga total yang akan didapatkan adalah sebesar 3,55 juta. Penyaluran dana dilakukan direct kepada penerima dari pemerintah pusat sehingga dinas tenaga kerja tidak memperoleh bagian anggaran yang ada.

Hasil observasi tersebut juga diungkapkan oleh salah satu penerima kartu prakerja yang mengungkapkan sebagai berikut.

“kalau sebenarnya dana yang diterima tiap bulannya itu 3,5 juta mbak akan tetapi kan di bagi-bagi dengan pelatihan dan sebagainya jadi bersihnya saya sebulan menerima 600 ribu ya lumayan mbak”.<sup>74</sup>

Adanya sarana yang sudah tepat dan memadai harus didukung dengan adanya sebuah disposisi yang baik dari para stakeholdernya yakni sebuah usaha atau dedikasi yang baik dari para staf kecamatan dan kepala desa berkaitan dengan adanya program kartu prakerja ini. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa staf kecamatan Sampung telah melakukan pekerjaan dengan dedikasi yang tinggi dengan melakukan sosialisasi dengan sukses dengan dihadiri oleh seluruh kepala desa kecamatan Sampung. Selain itu para kepala

---

<sup>74</sup> Eko Heri, Wawancara, 13 April 2023

desa juga senantiasa memberikan informasi serta keterbukaan terkait dengan informasi kepada para penerima kartu prakerja.

Hasil observasi tersebut selaras dengan pernyataan dari staf kecamatan sebagai berikut.

“ya mbak kalau bukan kita siapa lagi yang mau bergerak membantu masyarakat, sebagai pegawai kecamatan kita semaksimal mungkin melakukan pelayanan kepada masyarakat, saya pun juga salut kepada kepala desa yang antusias dalam pelaksanaan program ini sehingga bisa berjalan lancar dan bisa tepat guna dan sasaran”.<sup>75</sup>

Sebuah pelaksanaan ataupun penerapan dari sebuah kebijakan tidak akan lepas dengan adanya beberapa kendala yang akan dihadapi, sama halnya dengan kebijakan terkait dengan program kartu prakerja yakni yang kendala yang pertama adalah adanya berbagai persyaratan administrasi yang dirasakan terlalu Panjang dan banyak seperti misalnya harus melakukan pembuatan akun prakerja yang di dalam memuat banyak data yang harus dimasukan dengan melakukan pengunggahan beberapa dokumen dengan jenis dan ukuran tertentu, Pasalnya, masyarakat Kecamatan Sampung banyak yang masih tidak memahami ataupun melek akan teknologi yang ada, bahkan ada juga yang terganjal karena adanya e ktp yang tidak beres sehingga harus melakukan pengecekan ataupun permintaan di kantor dukcapil. Namun hal ini menjadi tanggung jawab pendaftar yang akan menerima kartu prakerja.

---

<sup>75</sup> Wahyuni, *Wawancara*, 12 April 2023

Kedua, banyaknya link atau tautan liar terkait dengan informasi program kartu prakerja sehingga membuang waktu atau mengecoh masyarakat yang membutuhkan informasi yang valid. Kemudian ketidaktelitian dari masyarakat itu sendiri yakni dengan banyaknya link masyarakat mengisi link dengan data diri tanpa tau laman tersebut resmi maupun laman palsu yang dilakukan oleh oknum guna memperoleh keuntungan tertentu yang berakibat pada masyarakat mengalami kesulitan saat ingin mendaftarkan dirinya pada laman prakerja yang resmi.

Ketiga, adanya kendala dari segi jaringan baik itu dari sisi pendaftar maupun dari sisi pemerintah sebagai pelaksana program. Kendala dari sisi masyarakat yakni banyaknya masyarakat yang masih belum mengerti akan teknologi yang ada dimana memang prakerja sendiri merupakan bentuk pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah secara daring baik itu proses pelatihan Sebagian masih daring, dan pada saat pendaftaran dan tahap seleksi. Kemudian pada pihak pemerintah sendiri kendala jaringan yang terjadi adalah seringnya laman yang tidak bisa di akses karena server yang bermasalah yakni pada laman [www.prakerja.go.id](http://www.prakerja.go.id). Hal tersebut menjadi suatu kendala yang perlu dilakukan evaluasi.

## **2. Strategi Program Kartu Prakerja Dalam Proses Seleksi Di Kecamatan Sampung**

Penerapan kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat baik itu kesejahteraan terkait dengan ekonomi maupun *skill*

berbentuk pelatihan harus mengendapkan kesesuaian penyaluran pada yang benar-benar berhak mendapatkannya atau bisa dikatakan setiap kebijakan harus dilakukan dengan tepat sasaran. Strategi dalam pelaksanaan penyaluran kartu prakerja sehingga sampai pada yang benar-benar membutuhkan dilakukan dengan beberapa cara oleh pemerintahan terkait dengan kebijakan kartu prakerja di kecamatan Sampung Ponorogo salah satunya adalah dengan melakukan pengumuman di berbagai platform media sosial dan selebaran pada setiap desa di kecamatan Sampung terkait dengan syarat dan ketentuan dalam mengikuti kartu prakerja. Berikut hasil observasi yang ditemukan peneliti.

### **Ponorogo Kerja! Syarat Daftar Prakerja Gelombang 49 di Kabupaten Ponorogo dan Besaran Insentifnya!**

Hartati · 13 Maret 2023, 10:13 WIB



***Gambar 3.4 Pengumuman syarat prakerja di website***

Selain melakukan pengumuman di berbagai website salah satunya seperti pada gambar di atas, pelaksanaan pengumuman terkait dengan syarat dan ketentuan kartu prakerja dan pelaksanaan seleksi juga menggunakan edaran yang diberikan oleh kepala desa di kecamatan

Sampung Ponorogo. Berikut penuturan dari salah satu kepala desa di kecamatan Sampung.

“Pada saat sosialisasi di kantor kecamatan setiap kepala desa diberikan surat edaran terkait dengan program prakerja mulai dengan waktu pelaksanaan dan syarat ketentuan yang ingin mengikuti untuk diteruskan kepada setiap RT yang kemudian disampaikan ke masyarakat”<sup>76</sup>

Perlunya strategi dalam melaksanakan seleksi penerima kartu prakerja di kecamatan Sampung sendiri dikarenakan banyaknya peminat yang ingin mendaftarkan diri dan memperoleh prakerja, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan seleksi karena jumlah kuota juga terbatas. Berikut hasil wawancara dengan staf kecamatan sampung terkait dengan syarat untuk seleksi penerima kartu prakerja.

“Kalau terkait dengan syarat dan ketentuan ini digunakan sebagai seleksi tahapan awal mbak dan kami juga mengacu pada peraturan yang diberikan oleh pemerintah pusat yakni harus WNI, kemudian ada Batasan usia, tidak sedang bekerja, dalam satu KK hanya dua saja yang dapat memperoleh kartu prakerja, kemudian juga tidak ASN, TNI/Polri”<sup>77</sup>

Strategi tersebut mampu memberikan proses seleksi secara ketat dan banyak yang gugur terutama pada aspek sedang tidak bekerja karena memang beberapa orang yang telah bekerja di instansi tertentu misalnya instansi pendidikan swasta masih ikut untuk mendaftarkan diri sebagai penerima kartu prakerja. Berikut penuturan dari salah satu pendaftar yang dinyatakan gagal.

---

<sup>76</sup> Wahyudi, *Wawancara*, 11 April 2023

<sup>77</sup> Bambang, *Wawancara*, 11 April 2023



“ya mbak saya tidak lolos prakerja karena memang NIK saya sudah terdaftar sebagai pengajar di salah satu sekolah swasta, mungkin hal itu ya mbak yang menjadikan tidak lolos, sebenarnya saya sedih mbak karena tidak lolos prakerja”<sup>78</sup>

Hasil wawancara tersebut selaras dengan beberapa laman berita terkait dengan pelaksanaan ketentuan dan persyaratan yang digunakan dalam melaksanakan seleksi pada kebijakan kartu prakerja. Seperti dikutip dari Peraturan Presiden No 36 Tahun 2020. Berikut ini beberapa tips yang dapat dilakukan pendaftar program kartu prakerja agar memperbesar peluang untuk lolos Kartu Prakerja gelombang 49 dengan memenuhi syarat:

- 1) Warga negara Indonesia yang berusia paling tidak adalah 18-64 tahun
- 2) Menganggur atau sedang tidak melakukan pendidikan formal
- 3) Warga sipil atau tidak berstatus ASN, Polri, TNI, kepala desa, komisari, dewan pengawas baik itu BUMN ataupun BUMD.
- 4) Tidak berstatus sebagai penerima bantuan baik itu bansos, bpum, bsu, dan prakerja pada gelombang yang sebelumnya.
- 5) Hanya 2 NIK dalam satu KK yang berhak memperoleh kartu prakerja

---

<sup>78</sup> Tini, *Wawancara*, 12 April 2023

### **3. Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Sampung.**

Data hasil penelitian menunjukkan keragaman latar belakang pekerjaan dari penerima manfaat kartu prakerja yakni mulai dari petani, pedagang, dan supir dan usaha kecil lainnya. Hasil kuesioner juga menunjukkan motif masyarakat dalam mengikuti kartu prakerja yakni untuk mendapatkan intensif, hasil tersebut dibuktikan dari sebanyak 8 responden atau 100% menjawab tujuan mengetahui program pelatihan prakerja adalah untuk mendapatkan intensif. Hasil kuisisioner tersebut selaras dengan pengungkapan pada wawancara yang dilakukan peneliti yakni terkait dengan peningkatan pendapat penerima kartu prakerja memang meningkat perbulannya. Berikut beberapa pertanyaan terkait dengan peningkatan pendapatan selama mengikuti program prakerja. Berikut penuturan dari bapak Eko.

“Pengeluaran keluarga baik sebelum dan sesudah mendapat prakerja ya kurang lebih berkisar Rp 1.400.000 mbak perbulannya, untuk pemasukan ya alhamdulillah setelah menerima prakerja ini meningkat paling tidak satu bulan yang sebelumnya Rp 1.500.000 menjadi Rp 1.800.000”.

Hasil dari wawancara lain juga menunjukkan memang pada awalnya penerima program prakerja memiliki penghasilan dibawah 1,5 juta perbulannya, dengan adanya penerima manfaat prakerja penghasilan perbulan meningkat menjadi sebesar 1,7 juta sampai dengan 2 juta perbulannya. Berikut penuturan dari bapak Hendri.

“untuk pemasukan ya alhamdulillah setelah menerima prakerja ini meningkat paling tidak satu bulan yang sebelumnya Rp 1.500.000 menjadi Rp 1.700.000.”

Hal ini sesuai dengan hasil kuisisioner dimana Indikator efektifitas yang lain dalam program pemanfaat kartu prakerja adalah ketepatan sasaran bagi yang berhak menerima yakni data menunjukkan bahwa rata-rata atau bahkan sebagian besar penerima manfaat kartu prakerja merupakan masyarakat dengan pendapatan dibawah dua juta pada setiap bulanya yakni pada kuesioner sebesar 87,5% menyatakan tidak setuju pada pendapat mencapai dua juta, pada indikator lain adalah kepastian pendapatan, data menunjukkan bahwa sebesar 87,5% atau 7 dari 8 responden menyatakan ketidakpastian dalam pendapatannya. Selanjutnya adalah indikator pemenuhan kebutuhan dengan pendapatan yang ada yakni apakah dengan pendapatan tersebut mampu memenuhi kebutuhan, sebanyak 8 responden atau 100% menyatakan bahwa pendapatan saat ini tidak mampu mencukupi kebutuhan.

Penerimaan manfaat terkait dengan kesejahteraan tidak hanya pada aspek ekonomi yakni penghasilan akan tetapi juga pada aspek ekonomi yang lain seperti dengan adanya peningkatan pada pendapatan penerima program prakerja dapat melakukan perbaikan terhadap papan yakni pada rumahnya. Berikut penuturan dari ibu Umi.

“Alhamdulillah soal rumah memang rumah saya sendiri dan saya rasa layak untuk saya, dengan adanya manfaat prakerja saya dapat sedikit memperbaiki pada bagian kamar mandi ya walau gak mewah sertidaknya lebih baik dari sebelumnya dan menambah perlengkapan yang ada”

Program yang didapatkan oleh penerima juga terkait dengan penggunaan keahlian seputar kompetensi aplikasi Microsoft excel yakni dengan data sebesar 87,5% atau 7 orang mengikuti pelatihan, hal ini sebagai bentuk pemenuhan kesejateraan dalam rasa kesamaam dan hak peluang dalam bekerja. Berikut penuturan hasil wawancara yang menyangkut pada aspek peningkatan keterampilan penerima prakerja.

“Iya mbak saya merasakan, yang sebelumnya saya belum pernah tahu bagaimana mengelola Microsoft dengan baik sekarang sedikit-sedikit tahu dan faham bagaimana cara pengoperasian aplikasi tersebut”.

Hal ini sebagai dampak atau imbas covid-19 yang dibuktikan dengan 100% responden menjawab “iya”. Indikator efektifitas yang lain adalah dengan adanya program kartu prakerja masyarakat merasakan bahwa kemampuan keterampilan dan pengetahuannya meningkat setelah mengikuti pelatihan yakni dengan data sebanyak 75% responden mengungkapkan peningkatan pengetahuan dan keterampilannya.

Indikator lain yakni adalah terkait dengan aspek pendidikan dimana memang yang berhak menerima manfaat program kartu prakerja adalah mereka dengan kebutuhan pendidikan dan keinginan belajar yang tinggi. Hasil kuesioner membuktikan kesadaran masyarakat akan pendidikan yakni dimana mereka sadar bahwa dengan pelatihan akan membantu dalam keahlian tertentu dengan jawaban “setuju” dan “sangat setuju” mencapai 100% tidak ada responden yang menjawab “tidak setuju”. Kemudian terkait dengan kebutuhan pendidikan memang banyak penerima yang tidak

menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun yakni sebanyak 2 orang tamatan sekolah dasar atau sebesar 25%, kemudian pendidikan terakhir sekolah menengah atas sebanyak 3 orang atau 37,5%, tingkat sekolah menengah pertama sebanyak 2 orang atau 25% kemudian tingkat lanjut yakni diploma 3 hanya 1 orang 12,5%. Hasil ini selaras dengan beberapa penuturan terkait dengan pendidikan seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Ridha.

“Iya mbak ada peningkatan mungkin yang awalnya saya belum bisa melakukan pembukuan melalui Microsoft excel sekarang saya sudah mulai bisa melakukan hal itu, meskipun saya lakukan tidak setiap hari”.

Hal ini juga dibarengi dengan peningkatan dalam upaya melakukan pendidikan terhadap para anak dari penerima prakerja yang berkeinginan dalam mendorong anaknya untuk melakukan sekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Berikut penuturan dari Ibu Damiyati.

“Alhamdulillah Pendidikan anak anak saya ya mulai dari sekarang saya rencanakan paling tidak minimal pendidikan 12 tahun mbak kalau sampai sarjana ya lebih alhamdulillah lagi, untuk saat sekarang ini anak anak masih kecil ya belum sekolah akan tetapi ya itu ada gambaran di saya paling tidak Pendidikan anak saya diatas saya”.

**IAIN**  
**PONOROGO**

## BAB IV

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### A. Implementasi Program Kartu Prakerja di Kecamatan Sampung

Implementasi kartu prakerja sendiri adalah satu bentuk dari kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah, berkaitan dengan hal tersebut dalam ranah penerapan kebijakan mengutip dari pendapat yang dikemukakan oleh Edward III yang dikutip oleh Subarsono, agustino, Winarno, dan Wahab mengungkapkan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi sebuah kebijakan public yakni adanya (1) Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur Birokrasi. Komponen tersebut harus diperhatikan dengan baik sebagai sebuah bentuk sistem yang memberikan pengaruh terhadap keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan pada penerapan kebijakan.<sup>79</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa adanya proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Sampung Ponorogo terkait dengan adanya penerima manfaat kartu prakerja, hal ini dilakukan dengan mengundang kepala desa dan melakukan sosialisasi. Jenis komunikasi dengan melakukan sosialisasi baik secara langsung dengan pertemuan ataupun melalui social media selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum, Wijayanto, dan Taufiq yakni terkait dengan

---

<sup>79</sup> Leo Agustino, “Dasar-Dasar Kebijakan Publik” (Bandung: Alfabeta, 2008).

pelaksanaan prakerja di Ponorogo khususnya kecamatan Sampung tahap komunikasi dilakukan dengan menggunakan media social instagram.<sup>80</sup>

Menurut Budiani memberikan pendapat terkait dengan pengukuran efektivitas sebuah program adanya beberapa indikator pengukuran yakni dengan salah satunya adalah adanya pelaksanaan sosialisasi program itu sendiri.<sup>81</sup> Sosialisasi program ini terkait dengan kemampuan dari penyelenggara dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program sehingga masyarakat mengetahui terkait dengan jenis kegiatan, hal yang akan dilakukan dan sasaran yang ingin dicapai dengan adanya program tersebut. Dalam hal sosialisasi program kartu prakerja oleh Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dirasakan sudah baik akan tetapi memang terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat adalah pada tahap pendaftaran tidak banyak masyarakat yang telah memahami bagaimana pelaksanaan atau Langkah-langkah dalam proses pendaftaran dan proses seleksi serta model pelatihan yang akan didapatkan nantinya. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian yang diungkapkan oleh para informan dimana mereka berusaha mencari informasi sendiri melalui berbagai cara baik itu forum diskusi group atau melalui berbagai media sosial dan website resmi terkait dengan informasi dari tahap pendaftaran, kemudian seleksi, kemudian macam dan jenis

---

<sup>80</sup> Heni Sukma Ningrum, Wijayanto, and A. Taufiq, "Implementasi Kebijakan Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Semarang," *Journal of Politic and Government Studies* 11, no. 4 2022: 160–71.

<sup>81</sup> Ni Wayan, Budiani, "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna 'Eka Taruna Bhakti' Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar." *Jurnal Ekonomi Dan Sosial Input* 2(1);, 2007, 49–57

pelatihan yang ada, sampai pada proses sertifikat dan pencairan dana insentif yang akan di dapatkan.

Keberhasilan implementasi kebijakan juga bisa dilihat dari sumber daya pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya sinergi baik antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan kecamatan. Selain sumber daya pelaksanaan kaitannya sumber daya ini adalah pada masalah anggaran dana yang diberikan. Mengutip dari pernyataan Menteri perekonomian yakni bapak Airlangga Hartarto sebesar 99,12% adalah angka persentase anggaran yang berhasil direalisasikan pada kartu prakerja tahun 2022 dengan serapan dana sebesar Rp 17,84 triliun. Berdasarkan data pencatatan dari kemenko sebanyak 4.984.790 orang telah mendapatkan manfaat dari adanya kartu prakerja.<sup>82</sup> Komite Cipta Kerja dan Manajemen Pelaksana (Project Management Office/PMO) menjadi pengemban tugas dalam melaksanakan sekaligus implementor serta penanggung jawab dalam melaksanakan program kartu prakerja. Pembentukan terkait dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja diputuskan bahwa program tersebut akan dilaksanakan dan dinaungi oleh kementerian bidang perekonomian. Komposisi yang terbentuk dengan adanya perpu no 36 tahun 2020 adalah sebagai berikut dimana ketua yakni terletak pada Menteri koordinator bidang perekonomian, kemudian wakil ketua yakni diambil alih oleh kepala

---

<sup>82</sup> Anisa Sophia, "Dana Prakerja 2022 Cair Rp17,8 T, Dibagi Ke 4,9 Juta Orang," *CNBCINDONESIA*, 2023.



staf kepresidenan, dan terdapat sebanyak 6 anggota yang masing-masing adalah Menteri perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, mendagri, kemendikbud dan sekretaris Menteri bidang perekonomian<sup>83</sup>.

Pelaksanaan program bisa memenuhi efektivitas juga dikaitkan dengan adanya disposisi yang baik. Disposisi pada implementasi kebijakan mengartikan bahwa pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.<sup>84</sup> Implementasi kebijakan kartu prakerja di Ponorogo khususnya kecamatan Sampung sendiri telah berjalan dengan baik didukung oleh sikap para Tim Fasilitator Prakerja Kabupaten Ponorogo khususnya kecamatan Sampung yang memberikan kontribusi dalam mensukseskan kebijakan kartu prakerja yang dilandasi dengan komitmen dan kejujuran. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Koordinator Tim Fasilitator Prakerja yang mengatakan dengan jujur kepada masyarakat bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran kartu prakerja yang dilakukan di Kabupaten Ponorogo khususnya kecamatan Sampung.

---

<sup>83</sup> Wahyu Nurhadi, "Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19," *Journal of Political Science*, no. May (2020): 0–10.

<sup>84</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021).

## **B. Strategi Program Kartu Prakerja Dalam Proses Seleksi Di Kecamatan Sampung**

Pelaksanaan kartu prakerja merupakan bantuan berupa semi bansos yang dilakukan oleh pemerintah dengan anggaran yang cukup besar dan peminat yang sangat tinggi maka perlunya pemerintah dalam melakukan beberapa strategi dalam pelaksanaannya yakni menurut Direktur Eksekutif Prakerja Denni Puspa Purbasari menuturkan, selama ini ada tiga strategi dalam menjalankan program Kartu Prakerja dengan tahapan inovasi, literasi dan pengembangan bisnis.<sup>85</sup> Hal tersebut selaras dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh kecamatan Sampung dimana adanya inovasi dalam melakukan sistem komunikasi yang dilakukan yakni dengan memberikan informasi pada website dan beberapa platform berita, sedangkan pada literasi pemerintah kecamatan sampung mengadakan sosialisasi di balai kecamatan terhadap kepala desa terkait dengan program yang ada. Kemudian proses pengembangan bisnis dimana hal ini dimaksudkan pemerintah dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang ada.

Proses pelaksanaan pemanfaatan kartu prakerja mempunyai banyak sekali peminat sehingga pemerintah menerapkan strategi ketentuan dan persyaratan sehingga penerima manfaat prakerja benar-benar mereka yang

---

<sup>85</sup> Ahmad Fikri Noor, "Ini Tiga Strategi Pemerintah Dalam Menjalankan Program Kartu Prakerja," *Republika*, 2023.

layak mendapatkannya. Penerapan ketentuan mengutip dari CNBC adalah sebagai berikut.<sup>86</sup>

- 1) WNI berusia minimal 18 tahun
- 2) Tidak sedang mengikuti pendidikan formal
- 3) Tidak menyandang status sebagai pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, Anggota Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- 4) Tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah seperti Bansos Kemensos (DTKS), penerima BSU, BPUM atau penerima Kartu Prakerja Gelombang sebelumnya
- 5) Dalam satu Kartu Keluarga (KK) hanya diperbolehkan maksimal dua orang anggota keluarga yang dapat menjadi penerima Kartu Prakerja



---

<sup>86</sup> CNBC, “Segera Daftar Kartu Prakerja 2023, Ini Syarat & Caranya!,” *CNBCINDONESIA*, 2023.

### **C. Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Sampung dalam Perspektif Islam**

Hasil penelitian yang dilakukan terkait ketetapan penerima manfaat kartu prakerja di kecamatan sampung dibagi menjadi 4 indikator yakni kesesuaian dengan latar belakang pekerjaan, pendidikan, pendapatan dan kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan penerima manfaat kartu prakerja di kecamatan sampung sudah sesuai dengan sasaran yang ada seperti hal mereka yang memiliki tingkat pendapatan rendah, kemudian terkait dengan tingkat kesejahteraan yang masih kurang, dan terkait dengan pendapatan dengan kisaran 1,5 juta perbulannya dengan adanya prakerja penerima manfaat mengungkapkan bahwa mereka memngharapkan insentif yang diberikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas usaha yang telah dimiliki. Hasil penelitian selaras dengan yang dilakukan oleh Sinaga dimana memang ada pengaruh terkait dengan jaminan sosial prakerja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>87</sup> Hal ini selaras atau sesuai dengan teori pemenuhan kesejahteraan dalam pandangan islam terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan dasar hidup seseorang.<sup>88</sup> Penelitian dari Hakim mengungkapkan bahwa adanya manfaat prakerja hanya mampu membantu komunitas secara fisik-materi dan secara mental-

---

<sup>87</sup> Risni Sinaga, "Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Penerima Kartu Prakerja Di Kabupaten Banyumas Tahun 2020)," *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Saizu 19* (2022).

<sup>88</sup> Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Kencana, 2014), 114.

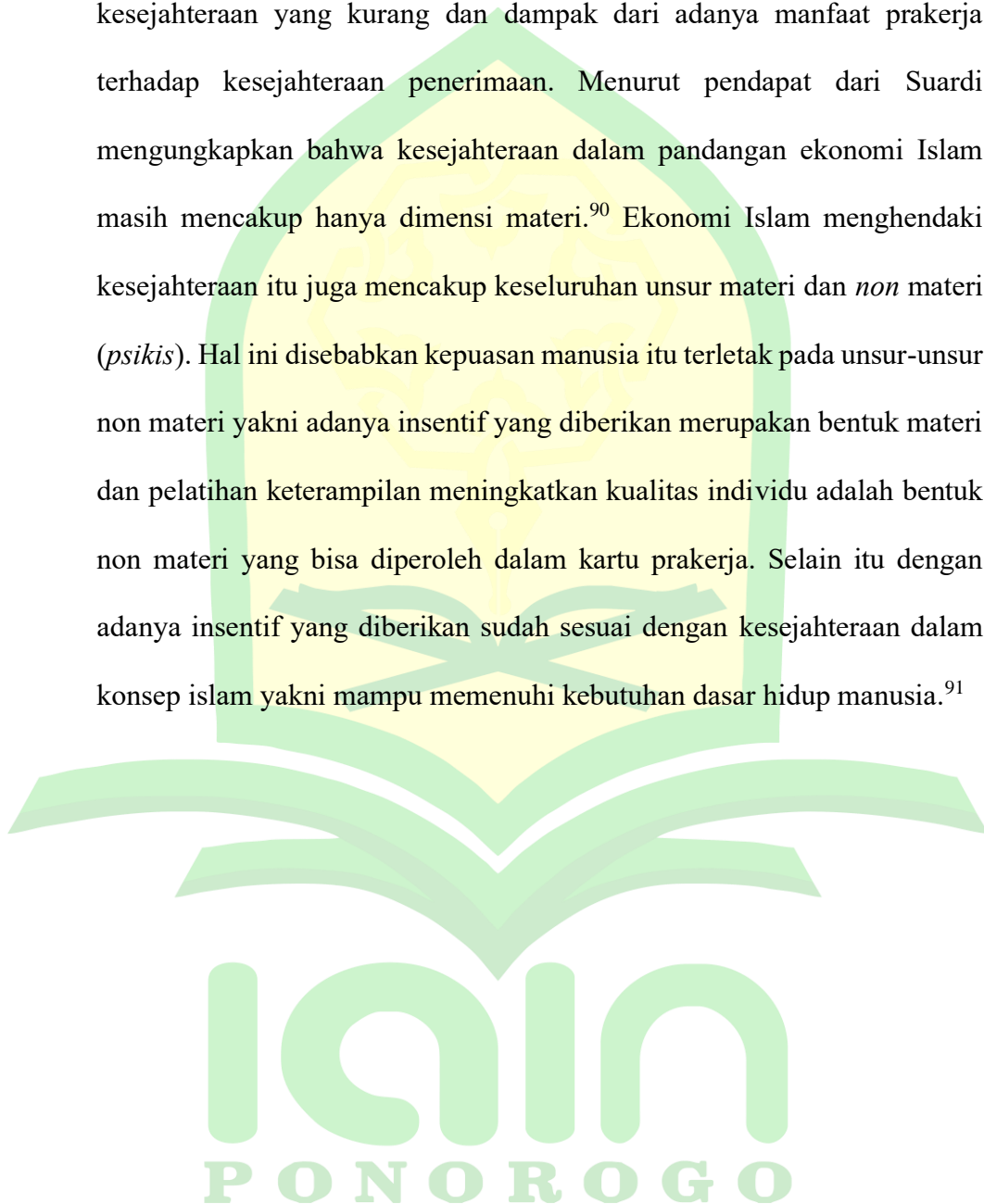
spiritual.<sup>89</sup> Namun diperlukan pemberdayaan program secara berkelanjutan dan peran asisten tidak ada, karena insentif hanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak mencukupi untuk modal usaha.

Hasil penelitian juga menunjukkan keterlaksanaan program yang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh John P Campbell pada bukunya *Productivity in Organization* (1990) yakni dengan terlaksana program penerima manfaat kartu prakerja di kecamatan sampung ponorogo, selain indikator sasaran juga telah sesuai bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan tergolong rendah, kemudian kesejahteraan, serta tingkat pendapatan yang masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan paparan data dari responden yakni pada tingkat pendapat Sebagian besar penerima manfaat kartu prakerja merupakan masyarakat dengan pendapatan dibawah dua juta pada setiap bulanya yakni pada kuesioner sebesar 87,5% menyatakan tidak setuju pada pendapat mencapai dua juta, pada indikator lain adalah kepastian pendapatan, data menunjukkan bahwa sebesar 87,5% atau 7 dari 8 responden menyatakan ketidakpastian dalam pendapatannya. Selanjutnya adalah indikator pemenuhan kebutuhan dengan pendapatan yang ada yakni apakah dengan pendapatan tersebut mampu memenuhi kebutuhan, sebanyak 8 responden atau 100% menyatakan bahwa pendapatan saat ini tidak mampu mencukupi kebutuhan.

---

<sup>89</sup> ABDURROHMAN Hakim, "Pelaksanaan Program Kartu Pra Kerja Untuk Menangulangi Pengangguran Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur)" (SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD" APMD", 2022).

Efektivitas program pemanfaatan kartu prakerja di kecamatan sampung Ponorogo sudah memenuhi sasaran baik itu penerima dengan kesejahteraan yang kurang dan dampak dari adanya manfaat prakerja terhadap kesejahteraan penerimaan. Menurut pendapat dari Suardi mengungkapkan bahwa kesejahteraan dalam pandangan ekonomi Islam masih mencakup hanya dimensi materi.<sup>90</sup> Ekonomi Islam menghendaki kesejahteraan itu juga mencakup keseluruhan unsur materi dan *non* materi (*psikis*). Hal ini disebabkan kepuasan manusia itu terletak pada unsur-unsur non materi yakni adanya insentif yang diberikan merupakan bentuk materi dan pelatihan keterampilan meningkatkan kualitas individu adalah bentuk non materi yang bisa diperoleh dalam kartu prakerja. Selain itu dengan adanya insentif yang diberikan sudah sesuai dengan kesejahteraan dalam konsep islam yakni mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia.<sup>91</sup>



---

<sup>90</sup> Suardi, "Strategi Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Umat."

<sup>91</sup> Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Kartu Prakerja Di Kecamatan Sampung menunjukkan bahwa adanya sinergi baik antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan kecamatan. Selain sumber daya pelaksanaan kaitanya sumber daya ini adalah pada masalah anggaran dana yang diberikan. Implementasi kebijakan kartu prakerja di Ponorogo khususnya kecamatan Sampung sendiri telah berjalan dengan baik didukung oleh sikap para Tim Fasilitator Prakerja Kabupaten Ponorogo khususnya kecamatan Sampung yang memberikan kontribusi dalam mensukseskan kebijakan kartu prakerja yang dilandasi dengan komitmen dan kejujuran. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Koordinator Tim Fasilitator Prakerja yang mengatakan dengan jujur kepada masyarakat bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran kartu prakerja yang dilakukan di Kabupaten Ponorogo khususnya kecamatan Sampung.

2. Strategi Program Kartu Prakerja Dalam Proses Seleksi Di Kecamatan Sampung pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak kecamatan Sampung dengan adanya inovasi dalam melakukan sistem komunikasi yang dilakukan yakni dengan memberikan informasi pada website dan beberapa platform berita, sedangkan pada literasi pemerintah kecamatan sampung mengadakan sosialisasi di balai kecamatan terhadap kepala desa terkait dengan program yang ada. Kemudian proses pengembangan bisnis dimana hal ini dimaksudkan pemerintah dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang ada. Proses pelaksanaan pemanfaatan kartu prakerja mempunyai banyak sekali peminat sehingga pemerintah menerapkan strategi ketentuan dan persyaratan sehingga penerima manfaat prakerja benar-benar mereka yang layak mendapatkannya.

3. Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Sampung. Indikator efektivitas yang lain dalam program pemanfaat kartu prakerja adalah ketepatan sasaran bagi yang berhak menerima yakni data menunjukkan bahwa rata-rata atau bahkan sebagian besar penerima manfaat kartu prakerja merupakan masyarakat dengan pendapatan dibawah dua juta pada setiap bulanya yakni pada kuesioner sebesar 87,5% menyatakan tidak setuju pada pendapat mencapai dua juta, pada indikator lain adalah kepastian pendapatan, data menunjukkan bahwa sebesar 87,5% menyatakan ketidakpastian dalam pendapatannya. Selanjutnya adalah indikator

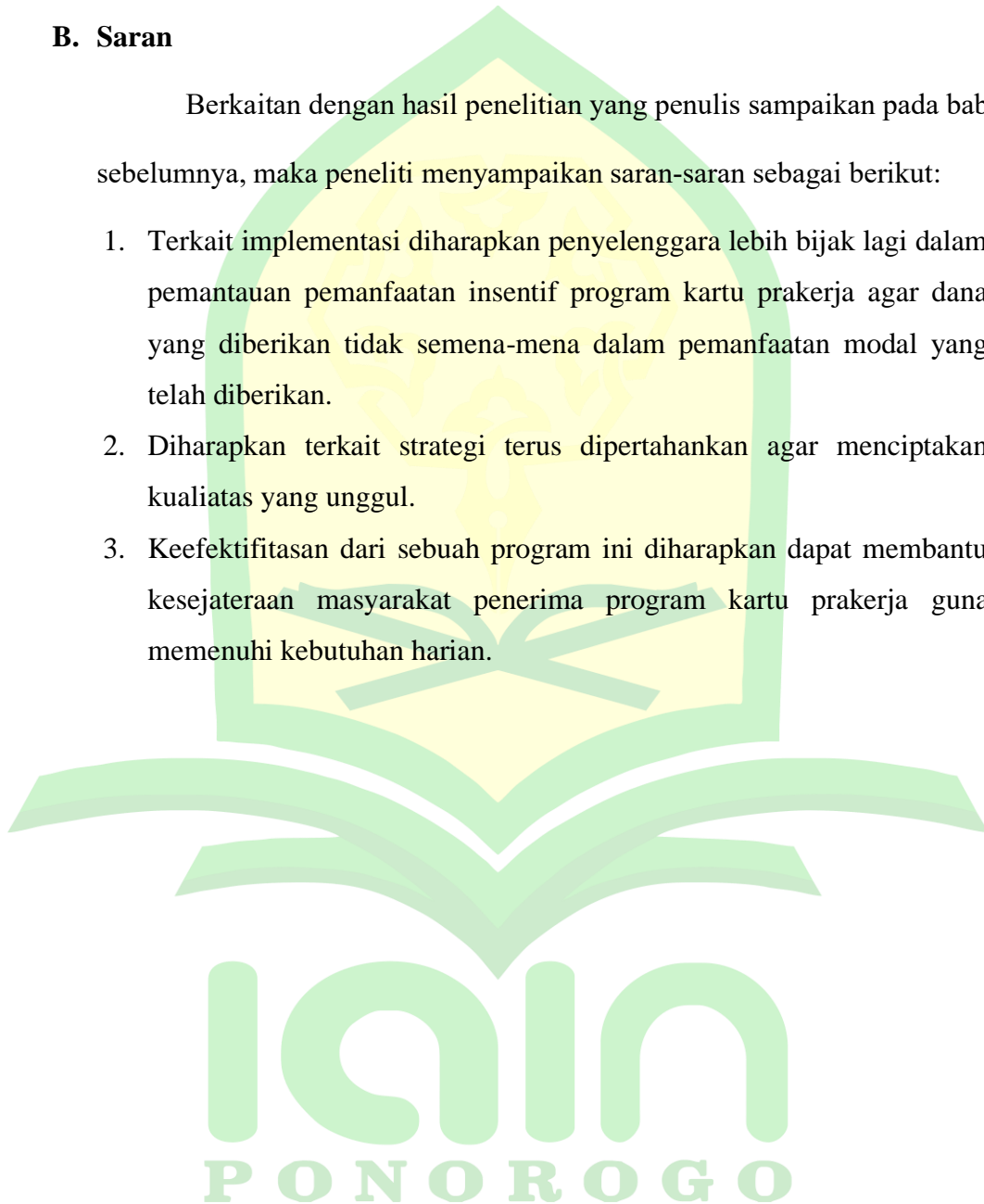


pemenuhan kebutuhan dengan pendapatan yang ada yakni apakah dengan pendapatan tersebut mampu memenuhi kebutuhan akan tetapi pendapatan saat ini tidak mampu mencukupi kebutuhan.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan hasil penelitian yang penulis sampaikan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Terkait implementasi diharapkan penyelenggara lebih bijak lagi dalam pemantauan pemanfaatan insentif program kartu prakerja agar dana yang diberikan tidak semena-mena dalam pemanfaatan modal yang telah diberikan.
2. Diharapkan terkait strategi terus dipertahankan agar menciptakan kualitas yang unggul.
3. Keefektifitasan dari sebuah program ini diharapkan dapat membantu kesejahteraan masyarakat penerima program kartu prakerja guna memenuhi kebutuhan harian.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agustino, Leo. "Dasar-Dasar Kebijakan Publik." Bandung: Alfabeta, 2008.
- Ambarwati. *Metode Penelitian Kualitatif*. Pati: CV Al Qalam Media Lestari, 2022.
- Anggito, Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Ekasari, Ratna. *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdaya Ekonomi*. Malang: AE Publishing, 2020.
- Faizin, Moh, M.S.E. *Ekonomi Makro Islam*. Edited by MOH NASARUDIN. EDISI 1. Pekalongan, Jawa Tengah: PT NASYA EXPANDING MANAGEMENT, 2021.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Buku\\_Ajar\\_Ekonomi\\_Makro\\_Islam/HCtTEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&pg=PR4&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Ekonomi_Makro_Islam/HCtTEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&pg=PR4&printsec=frontcover).
- Fauzia, Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Kencana, 2014.
- harahap syafri, sofyan. *Manajemen Kontemporer*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 1996.
- Hayani, Nurrahmi. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Benteng Media, 2014.
- J.S, Badudu. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Harapan, 1994.
- Leasiwal, Teddy Christianto. *Teori–Teori Pertumbuhan Ekonomi Dan Hubungannya Dengan Variabel Makro Ekonomi*. Sumatra Barat: mitra cendekia media, 2022.
- Marnis. *Pengantar Manjemen*. Pekanbaru: PT Panca Abdi Nurgama, 2009.
- Muri Yusuf, A. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Noor, Ahmad Fikri. "Ini Tiga Strategi Pemerintah Dalam Menjalankan Program Kartu Prakerja." *Republika*, 2023.

- Notowidagdo, Rohiman. *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman Dan Takwa*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2016.
- Nurul Imtihanah, Ani. *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*. Yogyakarta: CV GRE PUBLISHING, 2018.
- Poerwodarminto, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1978.
- Saprida. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Pt Kanisius, 2021.
- Streers, Richard M. *Efektivitas Organisasi*. Cetakan ke. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Sudarmanto, Eko. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. *Manajemen Publik*. Grasindo, 2005.
- Tarigan Akmal, Azhari. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Quran*. Bandung: Citapusataka Media Perintis, 2012.
- Usman, Husaini. *Manajemen*. Cetakan ke. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- Zuldafrial. *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka, 2012.

**Jurnal, Skripsi, Tesis:**

- Alia Rizki, Salsabilla. "Implementasi Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Di Akun Tiktok @panduanprakerja)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

- Badan Pusat Statistik. “Agustus 2022: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 5,86 Persen Dan Rata-Rata Upah Buruh Sebesar 3,07 Juta Rupiah per Bulan,” 2022.  
[https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/11/07/1916/agustus-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-86-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-07-juta-rupiah-per-bulan.html#:~:text=Tingkat Pengangguran Terbuka \(TPT\) Agustus,kerja yang terdampa.](https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/11/07/1916/agustus-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-86-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-07-juta-rupiah-per-bulan.html#:~:text=Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus,kerja yang terdampa.)
- CNBC. “Segera Daftar Kartu Prakerja 2023, Ini Syarat & Caranya!” *CNBCINDONESIA*, 2023.
- Firnanda, Adetya. “Evaluasi Program Kartu Prakerja Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan Dan Aksesibilitas.” *Hukum Magnum Opus* 4 Nomer 2 (2021): 172.
- Hakim, ABDURROHMAN. “Pelaksanaan Program Kartu Pra Kerja Untuk Menanggulangi Pengangguran Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur).” *SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD" APMD"*, 2022.
- HAKIM FADHOLLAH, MIFTAH. “Analisis Potensi Maladministrasi Dalam Kebijakan Program Kartu Prakerja.” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021.
- Harini, Siswi. “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ponorogo 2022.” Badan Pusat Statistik, 2022.
- . “Kecamatan Sampung Dalam Angka 2021.” Badan Pusat Statistik, 2021.
- Ika Wijayanti, Rani. “Optimalisasi Program Kartu Prakerja Dengan Pelatihan Branding Strategy.” *Dimasejati* vol 2 no 1 (2020).
- Kantor Kecamatan Sampung. “Letak Geografis Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo,” n.d. <https://sampung.ponorogo.go.id/category/pemerintahan/>.

“Kartu Prakerja,” n.d. <https://www.prakerja.go.id/>.

Meilani L.G, Anelia. “Program Kartu Prakerja Dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Coronavirus Disease 2019 (Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia).” Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.

Ningrum, Heni Sukma, Wijayanto, and A. Taufiq. “Implementasi Kebijakan Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Semarang.” *Journal of Politic and Government Studies* 11, no. 4 (2022): 160–71.

Nurhadi, Wahyu. “Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19.” *Journal of Political Science*, no. May (2020): 0–10.

Nuryani HS, Husni. “Sistem Pendukung Keputusan Pada Penentuan Penerimaan Kartu Prakerja Menggunakan Metode Simple Additive Weighting.” Universitas Bina Sarana Informatika, 2020.

Oktaviana, Nadya. “Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kualitas SDM Prespektif Maqasid Syariah (Studi Bentiring Permai Kota Bengkulu).” UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Prasetyo, Adryan. “Pengaruh Kartu Prakerja Dan Penetrasi Internet Terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia.” *Independent : Jurnal Of Economics* 2 nomor 1 (2022).

Rokamah, Ridho. “Efektifitas Program Ppa-Pkh Di Kabupaten Ponorogo: Tinjauan Yuridis Sosiologis.” *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 12, no. 1 (2015).

Royani Hamzah, Imam. “Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syariah” Vol 2 no 1 (2021).

Sabiq Balya, Muhammad. “Penerapan Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif AlMashlahah.” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* Volume 3 N (2021).

Sholikhah, Nurul Alfiatus. “Peran Lembaga Filantropi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Madiun).” *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 1, no. 1 (2021): 27–42.

Sinaga, Risni. “Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Penerima Kartu Prakerja Di Kabupaten Banyumas Tahun 2020).” *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Saizu* 19 (2022).

SITI RACHMAH, DINDA. “Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan (Evaluasi Perpres No. 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kom.” Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2020.

Sopia, Anisa. “Dana Prakerja 2022 Cair Rp17,8 T, Dibagi Ke 4,9 Juta Orang!” *CNBCINDONESIA*, 2023.

Suardi, Didi. “Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam.” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 321–34.

———. “Strategi Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Umat.” *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 02 (2020): 68–80.

#### **Undang-Undang:**

Peraturan Presiden. “Perpres No 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.” Jakarta Pusat, 2020.

file:///C:/Users/ASUS/Documents/DATA

C/ANIK/ANIK

KAMPUS/SEMESTER 8/SKRIPSI 2023 SUKSES/6 DATA/Perpres

Nomor 113 Tahun 2022.pdf.

- . “Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial,” n.d.  
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/11tahun2009uu.htm>.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Anik Nur Ria
2. Tempat & Tanggal Lahir : Magetan, 27 Februari 2000
3. Alamat Rumah : Jl Botolengket RT/RW 20/06 Kel Sukorame  
Kec Mojojoto Kota Kediri
4. HP : 081977394564
5. E-Mail : [aniknurria22@gmail.com](mailto:aniknurria22@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK Dewi Sartika Kediri (2005-2007)
  - b. SDN Sukorame 1 Kediri (2007-2013)
  - c. SMP N 6 Kediri (2013-2016)
  - d. SMKS PGRI 2 Kediri (2016-2019)
  - e. IAIN Ponorogo (2019-2023)

### C. Karya Ilmiah

1. Artikel Jurnal  
“Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Muamalah Pada Pembelian Buah Mangga Dengan Sistem Tebas” pada Jurnal Minhaj

P O N O R O G O

Ponorogo, 03 Mei 2023

Anik Nur Ria



## CEK TURNITIN

### Anik Nur Ria 2

#### ORIGINALITY REPORT

**24%**  
SIMILARITY INDEX

**24%**  
INTERNET SOURCES

**11%**  
PUBLICATIONS

**17%**  
STUDENT PAPERS

#### PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	5%
2	<a href="https://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="https://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	3%
4	<a href="https://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	3%
5	<a href="https://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="https://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	2%
7	<a href="https://febis.iainbengkulu.ac.id">febis.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="https://blog.iain-tulungagung.ac.id">blog.iain-tulungagung.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="https://repo.uinsatu.ac.id">repo.uinsatu.ac.id</a> Internet Source	1%

## Perubahan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Terakreditasi "B" Berdasarkan SK BAN-PT Nomor:2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016  
Jl. Pramuka No. 156 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893 Ponorogo  
Website: www.iainponorogo.ac.id, email: febi@iainponorogo.ac.id

Hal : Perubahan Judul Skripsi

FORM F2

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
Di Tempat

Assalamu alaikum wr. wb.

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : Anik Nur Ria  
NIM : 401190023  
JURUSAN : Ekonomi Syariah  
No. HP : 81977394564

Mengajukan perubahan judul skripsi :

<b>JUDUL SKRIPSI LAMA</b>
EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO
<b>JUDUL SKRIPSI BARU</b>
EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PENERIMA DI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO DITINJAU DENGAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
<b>ALASAN</b>
Kurang Tepat, Sebab Kesejahteraan Hanya Diperuntukkan Bagi Penerima Program Kartu Prakerja Tidak Keseluruhan Masyarakat Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Sertakan Analisis Prespektif Ekonomi Islamnya Seperti Apa Agar Sesuai Dengan Jurusan

Demikian atas perkenankannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu alaikum wr.wb.

Mengetahui,  
Pembimbing

Candra Febrilyantri, M.Ak.

Ponorogo, 05 Juni 2023  
Hormat Kami

Anik Nur Ria  
NIM 401190023

Mengesahkan  
Ketua Jurusan  
Ekonomi Syariah



Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I.  
NIP.197801122006041002